

PERJUANGAN

Rakyat Lumajang

Dalam Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan

(1942 - 1949) Edisi II

Penyunting :

Joko Pramono

Lutfia Amerta Sanjiwani, S.Pd

Penerbit Dewan Hasanah Cabang

Badan Pembudayaan dan Perjuangan '45 Kabupaten Lumajang

2018

ISBN : 978 - 979 - 17173 - 0 - 4

PERJUANGAN

Rakyat Lumajang

Dalam Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan

(1942 - 1949) Edisi II

Penyunting :

Joko Pramono

Lutfia Amerta Sanjaya

Penerbit Dewan Harian

Badan Pembudayaan dan Perjuangan Kemerdekaan

2018

ISBN : 978 - 079 - 17173 - 0 - 4

PERJUANGAN RAKYAT LUMAJANG

**Dalam Merebut dan Mempertahankan
Kemerdekaan (1942-1949)**

Penyuting
JOKO PRAMONO
LUTFIA AMERTA SANJIWANI, S. Pd

Penerbit : Dewan Harian Cabang
Badan Pembudayaan Perjuangan '45 Lumajang
2018

Penyunting : Joko Pramono
Lutfia Amerta Sanjiwani, S. Pd

Perjuangan Rakyat Lumajang Dalam Merebut dan Mempertahankan
Kemerdekaan/1942/1949/Cet.2/Lumajang/Penerbit Dewan Harian Cabang
Badan Pembudayaan Perjuangan '45 Lumajang, 2018

xvi, 182 hlm.; 14 x 21 cm

ISBN : 978 – 979 – 17173 – 0 – 4

Bibliografi; hlm. 181 / 182

**PERJUANGAN RAKYAT LUMAJANG
DALAM MEREbut DAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN/1942/1949**

Penyusun: Tim Penyusunan Buku Perjuangan Rakyat Lumajang Dalam Merebut
dan Mempertahankan Kemerdekaan 1942-1949, DHC '45 Lumajang
Anggota: Drs. H. Wahyudi (Ketua), Drs. H. Kadar Sriyono, Ir. Tony Soepeno, Agus
Amir Subchan, Drs. Wijoto, Dra. Nanik Ari Cahyani Kamari Sampoerno, Suwadi,
Ny. Giatmoko, Taufik Badruchi, Bendhoel Basuki, Aminudin Azis, S.Sos., Joko
Pramono.

Editor: Joko Pramono

Diterbitkan oleh: Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Perjuangan '45
Lumajang

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Hak cipta ada pada Dewan Harian Cabang Badan
Pembudayaan Perjuangan '45 Lumajang

Cetakan II: 2018

Gambar sampul depan: Monumen Perjuangan di TMP Lumajang

Grafis: Fariz Salasa

Foto: Vivid Tatto



1. KART. KARTADIRENJO (1929 - 1941)
2. R. ABU BAKAR (1941 - 1948)
3. R. SASTRODIKORO (1948 - 1959)
4. R. SOEKARDJONO (1959 - 1966)
5. NG. SOEBOWO (1966 - 1973)
6. SOEWANDI (1973 - 1983)
7. KARSID (1983 - 1988)
8. HM. SAMSI RIDWAN (1988 - 1993)
9. H. TARMIN HARIADI (1993 - 1998)
10. H. ACHMAD FAUZI (1998 - 2003)
11. H. ACHMAD FAUZI - H. HARTONO, SH, S.Sos (2003 - 2008)
12. H. SJAHAZAD MASDAR, MA - Drs. AS'AT, MAg (2008 - 2013)
13. H. SJAHAZAD MASDAR, MA - Drs. AS'AT, MAg (2013 - 2015)
14. Drs. AS'AT, MAg - dr. BUNTARAN SUPRIANTO. M.kes (2015 - 2018)



SAMBUTAN PLT BUPATI LUMAJANG dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas karuniaNya Buku Perjuangan Rakyat Lumajang Dalam Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan (1942 – 1949) Edisi II dapat diselesaikan, sebagai PLT Bupati Lumajang, saya tentunya sangat bangga dengan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, adalah sebuah penghargaan dan penghormatan bagi perjuangan yang pernah dilakukan rakyat Lumajang.

Saya sangat berharap semoga buku ini, menambah khasanah sejarah yang pernah terjadi di Kabupaten Lumajang.

Kesan yang diharapkan dari terbitnya buku ini adalah tiada perjuangan yang tanpa pengorbanan, dengan pengorbanan maka perjuangan itu akan memiliki nilai – nilai luhur.

Perjuangan yang ditempuh rakyat Lumajang pada masa-masa pra kemerdekaan hingga kemerdekaan itu tiba masih harus berlanjut dengan usaha mempertahankan kemerdekaan.

Tiada sekat dan batas untuk kalangan dan kelompok tertentu. Rakyat, Pemerintah, TNI, POLRI, Pribumi, Non Pribumi bahu membahu dalam mewujudkan cita-cita proklamasi.

Perjuangan Bangsa Indonesia adalah sebuah perjalanan panjang yang tak kan pernah berakhir sampai kapan pun.

Meski saat ini kita tidak lagi mengangkat senjata, bergerilya dan berperang melawan penjajahan, namun semangat jiwa patriotisme, rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara adalah modal utama dalam rangka mengisi kemerdekaan.

Dengan buku ini, saya juga berharap terhadap generasi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat lainnya mampu merefleksikan dirinya untuk mengisi pembangunan, mengemban cita – cita luhur proklamasi 17 Agustus 1945.

Akhirnya saya selaku PLT Bupati Lumajang, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan '45 Kabupaten Lumajang atas jerih payahnya untuk menyusun buku ini, semoga dengan terbitnya buku ini dapat memberikan inspirasi dengan munculnya pemikiran, ide – ide konstruktif yang dapat bermanfaat bagi pembangunan, khususnya di Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 6 Juni 2018

PLT Bupati Lumajang

Ttd

dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes.



SAMBUTAN KETUA DHC BADAN PEMBUDAYAAN KEJUANGAN '45 KABUPATEN LUMAJANG KADAR SRIYONO

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Merdeka!!!

Puji syukur kehadiran Illahi, bahwa hanya kehendakNya Buku Sejarah Perjuangan Rakyat Lumajang Dalam Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan (1942 – 1949) Edisi II dapat diselesaikan dengan baik, Tentu saja hal ini atas kerja keras Tim Penyusun serta dukungan moril dan materiil dari berbagai pihak hingga buku ini dapat diterbitkan.

Sebagai organisasi pengemban amanah dan pemelihara nilai kejuangan '45 di Kabupaten Lumajang, kami merasakan kebanggaan yang luar biasa karena setidaknya buku ini merupakan penghargaan setinggi – tingginya atas jasa-jasa dan pengorbanan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Namun kami juga merasa bahwa buku ini tidaklah sebanding dengan perjuangan yang telah dilakukan oleh para pejuang kita di masa lampau. Namun setidaknya kami ingin menyampaikan kepada masyarakat sekaligus berusaha

menyemangati generasi penerus bangsa, untuk tetap berpegang teguh pada cita-cita luhur yang diikrarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945.

Buku Edisi II ini sebagai bentuk catatan sejarah yang terlewatkan yang belum terangkum pada buku Edisi I.

Kiriman data serta foto-foto perjuangan dari para ahli waris, tokoh pejuang sangat membantu dalam memberikan penjelasan, bahwa peristiwa sejarah itu memang benar-benar terjadi, peristiwa perlawanan rakyat Lumajang terhadap kekuatan asing yang ingin menjajah kembali bumi pertiwi khususnya di Kabupaten Lumajang.

Dorongan moril serta kesaksian dari para saksi sejarah yang masih hidup adalah sangat diperlukan dalam upaya penyusunan Buku Edisi ke II ini.

Para pejuang dimasa itu hanya berkeinginan agar kemerdekaan yang telah diraih dengan sekuat tenaga, dapat di pertahankan tidak di sia-siakan.

Mereka cukup bahagia dan berbangga bahwa generasi penerus bangsa dapat mengisi kemerdekaan ini dengan membangun negeri ini guna generasi berikutnya.

Disisi lain, kami sangat berharap dengan terbitnya Buku Edisi II ini Generasi Muda dapat mengetahui bahwa para pahlawan lokal yang namanya diabadikan menjadi nama jalan di Kabupaten Lumajang benar-benar telah menyumbangkan dharma bhaktinya untuk sebuah kemerdekaan.

Terakhir, dengan terbitnya Buku Perjuangan Rakyat Lumajang Dalam Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan (1942-1949) Edisi II. Kami berharap mendapatkan kritik saran, informasi, karya tulis dari para pembaca.

Tentu saja saja kami masih beranggapan bahwa tidak ada kesempunaan, karena yang sempurna hanya milik Allah Yang Maha Sempurna.

Lumajang, 6 Juni 2018

Dewan Harian Cabang

Badan Pembudayaan Kejuangan '45

Ttd

KADAR SRIYONO



SAMBUTAN PUTRA PEJUANG ALM. MAYJEN SOEKERTIJO Ir. DEWANTO SOEKERTIJO

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah bahwa buku "Perjuangan Rakyat Lumajang" edisi II ini telah terbit untuk menambah koleksi pustaka tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Tentunya buku ini terwujud atas kerja keras para penyusunnya sebab para pelaku sejarah yang sebenarnya telah gugur di medan perang dan yang lainnya juga telah meninggal dunia.

Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk para generasi muda, untuk masyarakat Lumajang, masyarakat Jawa Timur dan semua warga negara Indonesia agar dapat termotivasi untuk selalu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Soekertiyo hanya salah satu pejuangnya, untuk itu kami putra putri almarhum Mayor Jenderal Soekertiyo mengucapkan terima kasih kepada para pejuang lain yang tergabung dalam TNI, Polisi, Laskar Hizbullah, TRIP, VDKL dan semua rakyat Lumajang yang telah ikut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lumajang, 6 Juni 2018

Ttd

Ir. DEWANTO SOEKERTIJO

Daftar Isi

Sambutan ...	iv
Pengantar Penulis ...	vi
Pengantar Penerbit ...	viii
Daftar Isi ...	ix
Daftar Gambar ...	183

BAB 1.

PENDUDUKAN JEPANG; SEBUAH BENTUK BARU PENJAJAHAN ...	1
A. Kekalahan Belanda atas Jepang ...	1
B. Mobilisasi Rakyat Indonesia oleh Jepang ...	5
C. Jepang juga Berjasa Untuk Lahirkan Militansi ...	9
D. Mobilisasi Jepang di Lumajang ...	10
E. Pemerintahan Lumajang ...	12
F. Kondisi Sosial dan Ekonomi ...	13
G. Pendidikan ...	15
H. Romusha dan Proyek Pertahanan Jepang di Lumajang ...	16
I. Pembangunan Lapangan Terbang Sementara Pandanwangi ...	17
J. Proyek Pertahanan Jepang di Pasirian ...	22
K. Gunung Rangka ...	22
L. Gunung Tambu ...	23
M. Gunung Gajah Mungkur ...	24
N. Bangunan Pertahanan di Tempursari dan sekitarnya ...	27

BAB 2.

KETERPURUKAN VS LAHIRNYA MILITANSI ...	30
A. Proklamasi di Lumajang ...	33
B. Peralihan Kekuasaan ...	35
C. Sejarah Lahirnya Angkatan Perang RI ...	38
D. Pembentukan BKR di Lumajang ...	40

E. RI memiliki Angkatan Perang ...	
F. TKR di Kabupaten Lumajang ...	42
G. Ketidakstabilan Ekonomi dan Moneter ...	43
H. Latar Belakang Invasi Sekutu dengan Kepentingan Belanda ...	45
I. Pertempuran Surabaya ...	47
J. Peran Pasukan Lumajang dalam Pertempuran Surabaya ...	50
K. Batalyon Ketunggeng ...	52
	53

BAB 3.

AGRESI MILITER PILIHAN TERAKHIR BAGI BELANDA ...	55
A. Inggris Meninggalkan Indonesia ...	55
B. Menjelang Agresi Militer Belanda I ...	58
C. Simpati Internasional ...	62
D. Kesiapan Militer Belanda vs Indonesia ...	66

BAB 4.

AGRESI MILITER BELANDA I ...	73
A. Indonesia Harus Dikuasai ...	73
B. Sehari Agresi Belanda di Lumajang ...	77
C. Menunjukkan Kembali Eksistensi Merah Putih ...	82
D. Serangan Umum Lumajang ...	84
E. Kevakuman Pemerintah Lumajang ...	87
F. Pembentukan VDKL ...	89
G. Situasi Lumajang dalam Pendudukan Belanda ...	93
H. Genjatan Senjata dan Kekecewaan ...	95
I. Pasukan Merah Putih Lumajang Hijrah ke Malang ...	98

BAB 5.

BELANDA BERKHIANAT (LAGI) ...	100
A. Penataan di Tubuh TNI ...	101
B. Intervensi Belanda ...	104

C. Agresi Militer II ...	106
D. Yogyakarta Dikuasai ...	110
E. Panglima Besar Jenderal Soedirman ...	114
F. Pasukan Lumajang Kembali ke Daerah Gerilya ...	118
G. Gugurnya Pejuang Lumajang ...	124
H. Aksi Polisional Belanda adalah Ilegal ...	129
I. Kembalinya Kekuasaan Pendopo Kabupaten Lumajang ...	131

BAB 6.

MERAH PUTIH ATAU TIDAK SAMA SEKALI ...	133
A. Perjuangan Pasukan Kompi Soewandak ...	134
B. Perjuangan Pasukan Letkol Soerodji ...	138
C. Perjuangan Pasukan Kompi Kyai Ilyas ...	141
D. Perjuangan Pasukan Kompi Soewignyo ...	145
E. Perjuangan Pasukan Kompi Soekertijo ...	147
F. Perjuangan Pasukan Kompi Kamari Sampurno ...	153
G. Perjuangan Pasukan Kompi Jalal ...	156
H. Perjuangan Pasukan Sambernyowo ...	161
I. Perjuangan Pasukan Zeni Pioner 22 Jatiroto ...	163
J. Perjuangan Pasukan Polisi Tentara Republik Indonesia (PTRI) ...	165
K. Perjuangan Pasukan TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar) ...	169
L. Perjuangan Pasukan Polisi Negara ...	171
M. Mereka yang (juga) Berjuang ...	175
N. Tjokrosoedjono-Assisten Wedana Ranuyoso ...	176
O. Perjuangan Republiken ...	178

BAB 1

Pendudukan Jepang Sebuah Bentuk Baru Penjajahan

Kekalahan Belanda atas Jepang

Perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia tercapai dengan munculnya sejumlah peluang yang sebelumnya telah diperkirakan oleh beberapa tokoh nasional. Bung Karno dan Bung Hatta serta dr. Sam Ratulangi, telah memprediksikan bahwa masuknya Jepang ke Indonesia dengan mengalahkan kekuatan Belanda, akan membawa dampak positif bagi kebangkitan semangat juang bangsa Indonesia untuk terbebas dari penjajahan dan memproklamirkan kemerdekaan.



Kedatangan Jepang Di Indonesia

Sumber : <https://campusnancy.blogspot.com/2016/09/kedatangan-jepang-di-indonesia.html>

Diawali oleh pergantian Perdana Menteri Jepang pada bulan Oktober 1941 dari Konoe kepada Hideki Tojo. Sebenarnya hingga akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak sependapat untuk melawan Negara -negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Belanda secara bersamaan. Meskipun memiliki pasukan

yang tangguh dan keberanian serta loyalitas tinggi, namun menyerang Negara - negara besar adalah tindakan konyol yang tidak menguntungkan. Namun karena Amerika memberlakukan embargo untuk komoditi minyak bumi yang sangat diperlukan industri, maka satu-satunya alternatif adalah melawan mereka. Pada saat itu, sumber-sumber minyak bumi terutama di kawasan Asia Tenggara banyak dikuasai negara-negara Eropa dan Amerika.

Pada awal 1941, delegasi Jepang sempat datang ke Indonesia, salah satu negara yang terkenal dengan penghasil galian tambang dan merupakan koloni Belanda. Mereka berniat melakukan perundingan agar Hindia Belanda (penguasa Indonesia) untuk mengeskor sejumlah komoditi hasil tambang terutama minyak bumi untuk kepentingan industri Jepang. Namun sayang, perundingan ini menemui jalan buntu, akibat permintaan eskpor Jepang cukup besar. Sementara kemampuan eksplorasi minyak bumi pada waktu itu masih sangat terbatas. Akibatnya industri Jepang yang cukup maju, mengalami kendala yang cukup serius.

Hubungan Jepang dan Amerika menjadi renggang akibat sebagian wilayah jajahan Perancis di Vietnam, Laos dan Kamboja diduduki Jepang. Akhirnya embargo minyak bumi diberlakukan bagi Jepang. Tidak ada jalan lain bagi Jepang selain berperang melawan negara-negara besar yang telah menghancurkan masa depan industri Jepang.

Dengan usulan dan keberanian Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang yang menciptakan strategi penyerangan melalui jalan laut, akhirnya Jepang mampu menaklukkan perlawanan Amerika yang terkenal cukup tangguh. Strategi ini dianggap efektif karena dengan menguasai jalur laut, akan dengan mudah menguasai negara-negara jajahan Amerika, Inggris, Perancis, Belanda, hingga Australia. Seluruh potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk untuk pengangkut pesawat tempur, 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur (Wikipedia, 2006). Pada tanggal 7 Desember 1941 dilakukan penyerangan secara mendadak di basis Armada Pasifik Amerika Serikat yakni Pearl Harbor yang terletak di kepulauan Hawai.

Sedangkan kekuatan kedua, bertugas mendukung Angkatan Darat dalam Operasi Selatan, yaitu penyerangan atas Filipina, Malaysia dan Singapura yang kemudian dilanjutkan ke Indonesia, khususnya di kepulauan Jawa. Kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara meliputi 11 divisi infanteri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 150 hari.

Penyerangan Pearl Harbor dipimpin oleh Admiral Chuichi Nagumo. Hari minggu pagi tanggal 7 Desember 1941, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pembom pembawa torpedo serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam dua tahap. Pengeboman Pearl Harbor ini berhasil menenggelamkan dua kapal perang besar serta merusak 6 kapal perang lain. Selain itu pemboman Jepang tersebut juga menghancurkan 180 pesawat tempur Amerika. Lebih dari 2.330 serdadu Amerika tewas dan lebih dari 1.140 lainnya luka-luka. Namun tiga kapal induk Amerika selamat, karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor.

Lalu pada tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Belanda sebagai salah satu negara yang memiliki ikatan kerjasama dengan Amerika, juga menyatakan kebulatannya untuk melawan invasi Jepang. Melalui Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jhr. AW. Tjarda



Penyerangan Jepang terhadap Pearl Harbour

Sumber : <http://basajepang.blogspot.com/2012/03/24-fakta-serangan-jepang-ke-pearl.html>

van Starckenborgh Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang. Belanda memperkirakan, wilayah jajahannya juga akan menjadi sasaran Jepang dan hanya menunggu waktunya saja. Disamping itu, Belanda adalah salah satu negara yang tergabung dalam A.B.C.D. Front,

yakni gabungan negara sekutu untuk pertahanan militer yang terdiri dari Amerika Serikat, Britania, Cina, Dutch (A.H. Nasution, 1977).

Kekhawatiran Belanda ini akhirnya benar-benar terjadi. Invasi gencar dilakukan Jepang untuk menaklukkan negara jajahan Belanda di wilayah Hindia Belanda (Indonesia). Pada 10 Januari 1942 Jepang menduduki Tarakan, lalu kemudian berhasil menduduki Manado, Kupang, Balikpapan, dan Ambon. Pada Februari 1942 Jepang juga berhasil memukul mundur tentara Belanda di Pontianak, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Pendudukan Jepang di Palembang pada awal 1942, memiliki arti strategis bagi Jepang karena mampu memutuskan jalur komunikasi pemerintahan dan militer Hindia Belanda yang berpusat di Batavia dengan Singapura sebagai pusat pemerintahan jajahan dan militer Inggris (negara sekutunya).

Singapura juga mampu ditaklukkan Jepang pada 15 Februari 1942 setelah pasukan Jepang melakukan serangan darat, laut dan udara. Bahkan 2 kapal perang kebanggaan Inggris yakni Prince of Wales dan Repulse yang berpatroli di wilayah perairan Singapura berhasil ditenggelamkan oleh Jepang dan cukup membuat tekanan luar biasa bagi angkatan perang Inggris.

Di Indonesia, pertahanan Hindia Belanda menjadi porak poranda. Sejumlah pemimpin pemerintahan Hindia Belanda melarikan diri ke Australia, termasuk H.J. van Mook dan van der Plas yang akhirnya bermarkas di Camp Columbia Brisbane untuk selanjutnya kembali menyusun kekuatan guna kembali ke Indonesia dengan mempersiapkan pemerintahan baru, dengan nama "Netherlands Indies Civil Administration (NICA)". Kekuatan militer Jepang untuk penguasaan wilayah Jawa dipimpin oleh Letnan Jenderal Hiroshi Imamura. Pada 1 Maret 1942 mereka berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yakni di Teluk Banten, Eretan Wetan Jawa Barat dan Kragan Jawa Tengah yang kemudian dengan waktu yang cukup singkat, tentara Jepang mampu menyebar ke hampir seluruh wilayah Jawa. Meski tidak memiliki jumlah pasukan besar dibanding pasukan Hindia Belanda yang dibantu oleh KNIL dan GURKA, namun tentara Jepang mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Pengamat sejarah menyatakan bahwa kemudahan tentara Jepang masuk ke pulau Jawa disebabkan oleh sokongan rakyat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan (Tashadi dkk., 1986). Sedangkan tentara Belanda tidak mendapat

dukungan penuh dari rakyat karena Jepang melalui propagandanya yakni Perang Asia Timur Raya bertujuan untuk kemerdekaan bersama negara-negara Asia Pasifik mengusir penjajah negara-negara Eropa.

Akibat tekanan Jepang yang begitu hebat, baik di medan perang dengan menguasai sebagian besar aset Belanda di wilayah Asia Pasifik termasuk Indonesia, dan jalan diplomasi selalu menemui jalan buntu. Pada 8 Maret 1942, Belanda akhirnya menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Gubernur Jenderal Jonkheer Tjarda van Starkenborgh Stachouwer bersama Letnan Jenderal Hein ter Poorten, Panglima Tertinggi Tentara Hindia Belanda datang ke Kalijati dan memulai perundingan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan pihak Tentara Jepang yang diwakili oleh Letnan Jenderal Imamura. Jepang menyatakan, Belanda harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat, karena sebagian besar wilayah Hindia Belanda telah dikuasai. Letnan Jenderal ter Poorten, mewakili pemerintah Belanda menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Dengan demikian secara de facto dan de jure, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda sejak itu berada di bawah kekuasaan Jepang. Pada hari itu juga, tanggal 8 Maret 1942 Jenderal Hein ter Poorten memerintahkan kepada seluruh tentara Hindia Belanda untuk menyerahkan diri kepada bala tentara Kekaisaran Jepang (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1982/1983). Secara resmi, KNIL (Koninklijk Nederlands Indische Leger) dibubarkan dan semua perlawanan Belanda kepada Jepang dihentikan. Tanpa suatu pertempuran sengit, berakhirilah pertempuran di Jawa, yang oleh Jepang semula diduga akan memakan waktu dua sampai tiga bulan untuk dapat menguasainya (A. H. Nasution, 1977). Jepang menganggap dirinya berwenang mengisi kekosongan kekuasaan pemerintahan tersebut di wilayah bekas jajahan Belanda di kawasan Hindia Belanda (Depdagri, 1989).

Mobilisasi Rakyat Indonesia oleh Jepang

Kemenangan Jepang di sejumlah negara-negara Asia Tenggara tidaklah berlangsung lama. Setelah Amerika dan sejumlah negara besar lainnya memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap invasi Jepang sesuai Perjanjian Wina tahun 1942, beberapa tempat strategis yang menjadi pusat distribusi Jepang untuk kepentingan militernya mulai dikuasai kembali oleh

Amerika, Inggris dan Belanda. Pada awal 1943, gerakan ofensif Amerika berhasil merebut Buna, sebuah kota kecil di Papua New Guinea, yang dikenal dengan istilah **Papuan Campaign**. Gerakan ini dinilai merupakan awal kemenangan Amerika di wilayah Asia Pasifik, karena Amerika berhasil merebut kota sepanjang pantai utara sampai ke New Guinea Barat (Irian Barat). Sedangkan pusat logistik dan distribusi kebutuhan perang Jepang berada di wilayah Rabaul, sebuah kepulauan di Bismarck semakin lama semakin lumpuh, karena telah dikepung oleh pasukan Amerika, baik dari darat, laut maupun udara. Strategi Amerika yang melewati Rabaul sebagai obyek serangan ini ternyata cukup efektif untuk membuat Jepang kewalahan, karena jalur distribusi dan komunikasi Jepang dengan beberapa wilayah kekuasaan Jepang di daerah Asia Pasifik lainnya menjadi tidak berfungsi. Pertempuran dahsyat yang terjadi di laut sekitar Kepulauan Bismarck, dan kemudian di Kepulauan Solomon-Guadalcanal, akhirnya dimenangkan oleh tentara Amerika pada tanggal 8 Februari 1943 (Whitney, 1956).

Kekalahan Jepang secara terus menerus ini sangat mempengaruhi daerah-daerah jajahan Jepang khususnya di wilayah Asia Tenggara. Lebih dari itu, tentara Inggris juga melakukan serangan balasan di wilayah Malaysia, Singapura dan Filipina. Jepang semakin terpuruk, dan tidak ada pilihan lain kecuali memobilisasi rakyat yang masih berada di wilayah jajahan Jepang. Seluruh kegiatan diprioritaskan untuk kepentingan Jepang menghadapi sekutu. Pada saat itu, Jepang tidak hanya berkepentingan untuk mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia. Namun Jepang juga menjadikan Indonesia sebagai wilayah pertahanan untuk melawan Sekutu.

Semula, Jepang merencanakan wilayah Jawa dipergunakan sebagai penyedia bahan-bahan untuk keperluan operasi militer. Sedangkan Sumatera sebagai pemasok minyak bumi. Untuk itu Jepang berusaha merebut hati rakyat dengan membebaskan pejuang nasionalis yang diasingkan oleh Belanda, seperti Bung Karno, Bung Hatta dan Sjahrir. Setelah itu, untuk merebut dukungan di rakyat secara menyeluruh, Jepang juga membentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat) pada 9 Maret 1943, dengan tokoh-tokohnya yang terkenal yakni Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantoro, K.H. Mas Mansyur. Tidak lepas dari tujuan Jepang semula, Putera dibentuk untuk mendukung sepenuhnya

pergerakan Jepang melawan sekutu dengan mengambil dukungan dari rakyat. Untuk sementara waktu, tokoh-tokoh pergerakan diberikan kebebasan untuk melakukan gerakan-gerakan nasionalis yakni menumbuhkan semangat dan motivasi berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia jika keberadaannya di Indonesia tetap didukung. Dalam propagandanya, Jepang selalu menyatakan bahwa musuh yang harus dihadapi guna tercapainya kemerdekaan, adalah negara-negara besar (sekutu) sehingga rakyat harus bersatu membantu Jepang mempertahankan Indonesia.

Selama beberapa saat di awal pendudukan Jepang, rakyat Indonesia diperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaannya. Tentu saja hal ini mendapat sambutan yang luar biasa dan rakyat yang semakin yakin bahwa Jepang benar-benar akan memenuhi janjinya memberikan kemerdekaan. Gagasan Jepang untuk bekerjasama dengan kalangan nasionalis yang dibawah komando Imamura (Jenderal Jepang di Jawa) ini banyak menimbulkan kontroversi bagi pimpinan militer di Jepang. Selain lebih lunak dan banyak memberikan kelonggaran bagi negara jajahan, Imamura dianggap terlalu banyak memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memikirkan kemerdekaan. Namun celah tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh pejuang nasionalis Indonesia, terutama Bung Karno yang cukup kooperatif terhadap Jepang. Ide-ide kemerdekaan yang seringkali disuarakan Soekarno, justeru mendapat simpati yang tinggi dari tokoh militer Jepang.

Sedangkan untuk memperkuat unsur militer Jepang di Indonesia, pada 8 September 1943, Markas Besar Militer Jepang di Saigon memerintahkan untuk membentuk Giyugun (Angkatan Bersenjata Lokal) di sepanjang wilayah Asia Tenggara. Di Indonesia, Jepang membentuk Heiho (sayap militer lokal) terdiri dari sukarelawan dan milisi perang yang khusus dilatih dan dididik tentara Jepang untuk menghalau perlawanan sekutu. Secara resmi, giyugun atau heiho ini dibentuk pada 3 Oktober 1943. Agar militansi rakyat semakin tinggi untuk bekerjasama dengan Jepang, nama heiho dibuat lebih merakyat dengan sebutan PETA (Pembela Tanah Air) khusus untuk pasukan heiho di wilayah Jawa.



Tentara PETA Bentukan Jepang di Indonesia

Sumber : <http://www.kalendernesia.com/hari/7/hari-peringatan-pembela-tanah-air-peta>

Dengan pergerakan tokoh-tokoh nasionalis yang semakin gencar, pembentukan PETA di sejumlah wilayah mendapat perhatian yang besar dari rakyat. Pada tahun 1945, PETA telah beranggotakan lebih dari 120 ribu orang. Namun sebelum PETA ini benar-benar mendapat respon dari rakyat, Jepang juga membentuk sejumlah organisasi sayap semi militer, antara lain Seinendan (barisan pemuda), Keibodan (barisan pembantu polisi), Gakutotai (barisan pelajar), Jibakutai (barisan berani mati), dan Fujinkai (barisan wanita) (Notosusanto, 1968). Khusus untuk pemuda dan pelajar, mereka diberikan latihan dasar setingkat regu dan teknik dasar perang gerilya. Sedangkan untuk ibu-ibu dan wanita diberikan pelatihan masak-memasak untuk keperluan dapur umum atau dapur umum dan palang merah.

Mobilisasi Jepang akibat semakin gencarnya serangan sekutu, berdampak kepada rakyat di daerah pelosok dan pedesaan. Sebagian wilayah ini merupakan daerah strategis untuk pertahanan dan basis militer. Tentara Jepang akhirnya merencanakan melakukan pembangunan sejumlah proyek pertahanan dengan mempergunakan tenaga rakyat. Dengan alasan semua

lapisan masyarakat harus berjuang dan berkorban demi kemerdekaan, Jepang mengajak para pemuda untuk mengerjakan proyek-proyek besar, seperti benteng pertahanan, proyek bendungan dan lapangan terbang serta sejumlah proyek lainnya. Jepang menyebut pekerja ini dengan romusha, yang berarti buruh atau pekerja.

Bagi penduduk desa yang mau bekerja di proyek tersebut, akan diberi gelar pahlawan pekerja. Mula-mula, romusha hanya dikhususkan untuk pemuda saja. Namun karena ketidaklayakan pekerjaan dan jaminan hidup, lambat laun pemuda semakin sedikit jumlahnya akibat tewas mengenaskan. Akhirnya, semua kaum laki-laki di desa-desa, dipaksa untuk menjadi romusha. Mereka tidak hanya bekerja di daerah sekitar pemukimannya saja. Bahkan ada pula romusha yang dikirim ke Birma dan Muangthai untuk mengerjakan proyek sejenis. Pengiriman ini mulai dilakukan setelah bulan Oktober 1943, setelah Jepang mewajibkan seluruh petani untuk menjadi romusha. Padahal pada masa penjajahan Belanda, petani telah cukup sengsara akibat kebijakan cultuurstelsel (kebijakan tanam paksa). Namun kemudian, tanah garapannya harus ditinggalkan untuk menjadi romusha. Ironisnya, seluruh hasil pertaniannya juga turut dirampas untuk kepentingan militer Jepang.

Jepang Juga Berjasa Untuk Lahirkan Militansi

Kehadiran Jepang di Indonesia tentu membawa dampak yang selalu ambivalen, yakni positif dan negatif. Di satu sisi, Jepang banyak membawa kesengsaraan yang luar biasa meskipun kehadirannya hanya beberapa tahun saja, khususnya bagi rakyat yang tinggal di pelosok dan desa-desa. Namun di sisi lain, Jepang juga banyak membawa dampak positif, meskipun dampak ini tidak ditimbulkan secara langsung dan di luar perencanaan Jepang.

Pada awalnya kehadiran Jepang semata-mata untuk kepentingan penjajahan dan penguasaan atas potensi alam dan pemanfaatan tenaga rakyat yang sebenarnya tidak berbeda dengan kepentingan kolonial Belanda. Hanya karena Jepang lebih mengenal budaya serta tradisi bangsa-bangsa di belahan bumi timur, Jepang lebih cepat mengenali karakteristik masyarakatnya, dan dengan mudah dapat melakukan pendekatan serta meraih simpati dari rakyat, khususnya dari kalangan elit politik, tokoh agama dan pemerintahan.

Pembebasan sejumlah tokoh nasionalis dari pengasingan yang dilakukan Belanda, menimbulkan dampak yang beragam dan saling terkait. Pada awalnya, pembebasan Bung Karno, Bung Hatta dan beberapa tokoh lain, banyak memunculkan simpati dari tokoh pemikir dan kalangan intelektual. Lebih dari itu, beberapa tokoh ini memiliki dukungan massa yang besar, sehingga dukungan terhadap kebijakan Jepang ini, sangat menguntungkan bagi Jepang. Mungkin saja jika waktu itu komunikasi melalui media massa sudah seperti saat sekarang, mungkin gerakan politis Jepang akan mendapat sambutan lebih besar dan mungkin propagandanya akan berhasil dengan baik.

Pada bulan Juli 1942, Sukarno dan Hatta menyetujui pembentukan pemerintah Indonesia yang tunduk kepada militer Jepang. Mereka melihat sisi positif dari pembentukan pemerintahan yang akan memberikan kewenangan untuk membentuk angkatan perang, meskipun pada waktu itu masih dibawah kekuasaan Jepang. Para pemimpin menyatakan bahwa kekuatan bersenjata adalah sebagai sarana pendukung kemerdekaan dan kelengkapan sarana perjuangan (Sudianto S dan Abdul Kahar, 2000). Pemikiran tersebut diperkuat dengan momentum Konferensi Negara-negara Asia Timur di Tokyo pada 5 dan 6 November 1943 yang juga dihadiri oleh Bung Karno, Bung Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo. Pada saat pembukaan, dilakukan devile angkatan bersenjata dan demonstrasi perang tentara Jepang. Usai demonstrasi perang, Bung Karno berpaling ke wartawan Indonesia yang sedang meliput acara tersebut dan berkata dalam bahasa Belanda "Dit moeten wij hebben!" (Inilah yang harus kita miliki) (Sophiaan, 1987).

Kenyataan ini semakin memperkuat dukungan Bung Karno dan Bung Hatta kepada Jepang untuk memimpin pemerintahan di Indonesia, hanyalah strategi agar bangsa Indonesia dapat mempersiapkan diri mengusir penjajahan di Indonesia, termasuk Jepang nantinya. Mereka telah memperkirakan bahwa kehadiran Jepang di Indonesia tidak akan berlangsung lama.

Mobilisasi Jepang di Lumajang

Pada masa penjajahan Belanda, sejumlah orang Jepang telah berada di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Lumajang. Rata-rata mereka adalah

wirausahawan yang bergerak dibidang perdagangan dengan membuka toko besar ataupun kecil. Beberapa toko besar milik orang Jepang di Lumajang pada masa sebelum Jepang menjajah Indonesia adalah Toko Toshima, Toko Hayashi dan Toko Semeru. Mereka menjual tekstil, alat-alat tulis dan mainan anak-anak. Sementara sejumlah toko kecil di daerah pedesaan tersebar di sekitar Kawedanan Kota Klakah, Yosowilangun dan Pasirian. Mereka berdagang komoditas hasil bumi, disamping ada juga yang memiliki penggilingan padi. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menjadi mata-mata Jepang dan memberikan informasi kepada tentara Jepang mengenai pendudukan Belanda di Lumajang. Informasi mengenai medan atau kondisi wilayah juga menjadi bahan penting bagi tentara Jepang yang akan menguasai Lumajang. Hal ini dibuktikan dengan mudahnya tentara Jepang menguasai Lumajang pada saat pendudukan.

Setelah menguasai Surabaya tanpa perlawanan, Pasukan Jepang melakukan operasi pembersihan hingga di kawasan pantai ke arah timur, menuju Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, terus ke arah Timur ke Kraksan hingga ke daerah Bondowoso. Dari arah Kraksan inilah tentara Jepang memotong jalur, dengan melakukan perjalanan panjang atau long march ke arah barat daya. Dengan tidak diperkirakan sebelumnya, tiba-tiba pasukan Jepang yang telah meduduki wilayah Jawa Timur bagian timur.

Pada 15 Maret 1942 tepatnya pada jam 08.00 Jepang sudah sampai di Alun-alun Lumajang, dan tidak mendapat perlawanan berarti dari pasukan KNIL. Jepang cukup mengenal medan dan dengan cepat mampu menguasai instalasi penting. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan field preparationnya yakni mata-mata yang telah lama tinggal dan sudah lama mengamati medan, dengan menyamar sebagai pedagang toko di beberapa kota ketika Belanda masih berkuasa.

Sejumlah usahawan Jepang yang kembali lagi ke Lumajang untuk melakukan penguasaan diantaranya adalah Pemilik Toko di Desa Dawuhan Wetan, Jatiroto dan pemilik Toko Toshima di kota Lumajang. Mereka tahu betul obyek vital milik Hindia Belanda. Selain itu mereka juga fasih berbahasa Indonesia, Jawa dan Madura. Untuk merebut Lumajang, Jepang hanya menurunkan satu kompi pimpinan Kapten Nikamura. Setelah kondisi dianggap

aman dan terkendali, barulah Jepang menurunkan sejumlah perlengkapan militer lengkap yang selanjutnya bermarkas di sejumlah lokasi pertahanan, seperti di beberapa gunung di daerah Pasirian, Tempeh dan Candipuro.

Pemerintahan Lumajang

Setelah Jepang menduduki Lumajang, bukan hanya struktur militer saja yang mulai dibangun. Hampir seluruh tatanan sosial masyarakat juga dirombak. Sejumlah birokrat pada masa penjajahan Belanda dikumpulkan, utamanya para Kepala Desa (Petinggi) untuk selanjutnya dimobilisir mengumpulkan tenaga kerja yang akan dipekerjakan sebagai romusha baik di daerah Lumajang ataupun daerah-daerah lain. Seluruh istilah Belanda yang dipergunakan, juga diganti dengan istilah Jepang.

Demikian halnya untuk struktur pemerintahan. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, pada 9 Maret 1942 dikeluarkanlah Undang-undang yang mengatur peralihan pemerintahan Belanda ke Pemerintahan Jepang. Perubahan yang paling dirasakan dari peralihan tata pemerintahan ini adalah pelaksanaan Undang-undang no 27 tahun 1942. Pada intinya, undang-undang ini mengatur distrik atau pembagian pemerintahan di pulau Jawa dan Madura menjadi 17 Shuu atau sebelumnya disebut dengan Residentie. Sementara Kabupaten Lumajang sesuai aturan di atas, susunan pemerintahannya diatur sebagai berikut :

1. Syu (Karesidenan) yang kemudian dibagi menjadi Ken dan Syi
2. Ken dan Syi (Kabupaten dan Kotapraja) yang kemudian dibagi menjadi Gun
3. Gun (Distrik atau Kawedanan) yang kemudian dibagi atas Son
4. Son (Orderdistrik atau Kecamatan) yang kemudian dibagi atas Ku
5. Ku (Desa)

Kabupaten Lumajang sendiri membawahi 4 distrik atau kawedanan yakni :

1. Kawedanan Lumajang, membawahi Assistenan : Lumajang, Sukodono dan Senduro
2. Kawedanan Pasirian, membawahi Assistenan : Pasirian, Tempeh dan Candipuro

3. Kawedanan Yosowilangun, membawahi Assistenan : Yosowilangun, Jatiroto, dan Kunir
4. Kawedanan Klakah, membawahi Assistenan : Klakah, Randuagung dan Ranuyoso (Sumber : Chaniaco : Sejarah Lesan – Arsip Nasional, 1987)

Kondisi Sosial dan Ekonomi

Seperti dijelaskan pada bab ini sebelumnya, kondisi perekonomian dan sosial masyarakat pada pendudukan Jepang sangatlah memprihatinkan. Belum tuntas penderitaan petani akibat sistem tanam paksa atau cultuurstelsel pada masa VOC, kali ini mereka harus menanam sejumlah komoditas perkebunan dan pertanian tertentu untuk tujuan supplay industri Jepang. Untuk keperluan pembuatan goni, melalui perintah dari Keygun (Wedana), maka Khuchoo atau petinggi diwajibkan menggalakkan penanaman rosela atau rami di sawah-sawah penduduk. Selain itu, petani juga diwajibkan untuk menanam tanaman kapas dan jarak. Akibat tingginya penanaman tanaman non pangan, akhirnya kebutuhan pangan rakyat menipis. Jumlah barang persediaan semakin sedikit, maka harganya-pun juga semakin melambung. Di beberapa tempat terjadi kelaparan, seperti di wilayah Kecamatan Gucialit dan Ranuyoso. Beruntung, empat buah pabrik penggilingan padi dan pemasok beras di dalam kota masih beroperasi dengan baik, yakni di Citrodiwangsan (dalam kota), dan Suko, Tempeh dan Yosowilangun (luar kota).

Sedangkan untuk menunjang perekonomian rakyat dengan kesempatan kerja, beberapa pabrik masih beroperasi. Diantaranya pengelolaan tembakau di wilayah Tempeh dan Senduro, pabrik es di Laban, pabrik rosella di Rogotrunan, dan pabrik teh di Gucialit. Dengan berbekal kemampuan dan sisa keuangan, masyarakat juga mengerjakan pembuatan benang di rumah mereka masing-masing. Rata-rata mereka membuat benang dari kapas dengan mesin tenun dari kayu yang dijalankan dengan kaki. Sedangkan benang yang telah jadi, disetorkan kepada Jepang melalui petugas pemerintahan setempat, untuk selanjutnya diolah menjadi kain tenun.

Menjadi seorang petinggi atau lurah juga tidaklah mudah. Mereka harus menyetorkan hasil pertanian dan perkebunan sesuai permintaan tentara Jepang. Jika tidak ingin disiksa tentara Jepang, mereka harus menekan rakyat.

Namun karena kondisi rakyat pada saat itu sangat memprihatinkan, lurah juga tidak mudah melakukan penekanan. Akibat dari kondisi ini, tidak jarang lurah harus dimusuhi rakyatnya. Tidak jarang pula, jika setoran tidak memenuhi keinginan tentara Jepang, lurah akan disiksa atau dipukuli di hadapan rakyatnya.

Penderitaan rakyat masih ditambah pula dengan banyaknya aturan yang dikeluarkan Jepang, seperti tidak boleh menyalakan lampu di malam hari. Jika ada pesawat terbang rendah di atas pemukiman warga, tentara Jepang mengatakan bahwa pesawat musuh sudah datang dan memerintahkan kepada penduduk untuk tidak keluar rumah, segera mematikan lampu dan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah hingga diperbolehkan tentara Jepang. Padahal, perintah ini adalah siasat Jepang untuk membawa hasil panen rakyat yang telah disetorkan kepada Jepang, untuk selanjutnya dibawa dengan truk-truk besar ke Malang atau ke gudang tempat persediaan makanan untuk kepentingan perang Jepang.

Tentara Jepang juga membatasi kekayaan penduduk. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan hewan ternak, seperti sapi, kambing, dan kerbau. Tentara Jepang memaksa untuk membeli hewan ternak penduduk dengan harga yang sangat murah. Mereka sengaja mengkondisikan agar muncul ketergantungan warga dengan tentara Jepang, karena tidak ada pilihan pekerjaan lain bagi penduduk, selain mengerjakan sawah dan ladang mereka dengan tanaman yang sudah ditentukan. Tidak ada lagi hewan ternak yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

Demikian halnya dengan hasil panen. Hampir setiap hari, pasukan Jepang menggeledah rumah penduduk untuk memastikan bahwa tidak ada beras atau hasil panen lain yang disimpan. Seringkali penduduk akhirnya menggali tanah di sekitar rumah mereka untuk menyimpan beras, agar tidak diketahui tentara Jepang. Namun jika diketahui ada warga yang menyimpan beras, tentara Jepang akan langsung menyiksanya di tempat umum, dengan tujuan agar perbuatan ini tidak diulangi oleh warga lain. Tentara Jepang sengaja mempengaruhi psikologi penduduk agar mereka hormat dan patuh.

Sedangkan di sejumlah daerah yang berdekatan dengan proyek pembangunan benteng pertahanan Jepang, kondisinya jauh lebih

mengenaskan. Penduduk Lumajang yang berada di sekitar Bunker Jepang yang semula menanam padi diwajibkan menanam pohon jarak, hal ini dikarenakan pohon jarak digunakan menjadi pelumas senjata-senjata tentara Jepang. Penyiksaan dan kekejaman tentara Jepang sengaja ditunjukkan kepada penduduk. Jika ada romusha yang melarikan diri, akan langsung diseret ke tempat umum. Dihadapan warga, romusha ini disiksa atau bahkan dibunuh secara keji, kemudian mayatnya dikumpulkan dengan mayat romusha lain, yang tewas karena kecelakaan kerja, atau karena sakit. Dari kesaksian warga yang hingga buku ini disusun masih hidup di daerah Gondoroso Pasirian, mayat romusha yang tewas tidak segera dikuburkan hingga jumlahnya melebihi lima orang. Jika romusha yang tewas telah lima orang atau lebih (biasanya menunggu sehari-hari atau berminggu-minggu hingga menimbulkan bau busuk), mayat baru dimandikan sekaligus di sungai terdekat. Padahal penduduk memanfaatkan sungai tersebut untuk keperluan sehari-hari, sehingga sejumlah penyakit menular, mulai menjangkiti warga. Satu per satu penduduk meninggal dunia, akibat penyakitnya tidak dapat disembuhkan dan dengan cepat penyakit ini menular ke seluruh penduduk. Dalam istilah Jawa, penularan penyakit seperti ini disebut *pageblug*.

Pendidikan

Pada masa pendudukan Jepang di Lumajang, sebenarnya tidak banyak yang mengalami kemajuan berarti di bidang pendidikan umum. HIS dihapus, dan diganti dengan Sekolah Rakyat (setingkat sekolah dasar) berkedudukan di sebelah timur Alun-alun kota Lumajang. ELC atau sekolah khusus anak pejabat, priyayi dan anak Belanda yang berada di tenggara Alun-alun (setingkat SD juga) dihapus oleh Jepang dan muridnya dilebur ke Sekolah Rakyat. Demikian halnya dengan sekolah khusus anak-anak keturunan (Cina) yang berada di Jl. Panjaitan (saat ini), juga ditutup Jepang. Namun tidak banyak siswanya yang melebur ke Sekolah Rakyat. Mereka lebih memilih untuk berdagang, mengikuti jejak orang tuanya.

Sekolah dalam bahasa Belanda dilarang, dan sisa buku dalam bahasa Belanda serta bahasa asing lainnya harus disensor terlebih dahulu sebelum beredar di sekolah-sekolah. Proses pendidikan lebih banyak diarahkan untuk

propaganda kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya guna mendukung pendudukan Jepang. Olah fisik dan pendidikan di luar sekolah lebih banyak dilakukan, utamanya yang bersifat kegiatan olah fisik semi militer, seperti baris berbaris, senam dan olahraga khas Jepang yakni sumo. Kenrohosi atau kerja bakti yang dilakukan rutin, ditujukan untuk menanam tanaman jarak sekaligus memetik dan mengumpulkan buahnya untuk selanjutnya disetor kepada tentara Jepang.

Sebelum masuk, siswa diwajibkan berbaris di halaman sekolah. Mereka harus berdiri tegak kemudian membungkuk hingga 45 derajat, sambil menghadap ke arah timur laut dimana negeri Jepang berada. Jika siswa tidak melakukannya dengan benar, bisa dipastikan akan mendapat pukulan dari guru. Prosesi penghormatan ini biasanya dilakukan selama beberapa menit, layaknya dalam prosesi mengheningkan cipta dalam upacara. Setelah itu, siswa diharuskan melakukan taiso (senam bersama) dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Nippon.

Pada masa itu, pendidikan sekolah diajarkan dengan disiplin yang tinggi. Jika ada pelanggaran, guru sekolah akan langsung menjatuhkan hukuman fisik, mulai pemukulan hingga kenrohosi atau kerja bakti memetik buah jarak. Dalam menjalankan tugasnya, guru sekolah diawasi oleh seorang sakura (pengawas dari pihak sipil Jepang). Sekolah di Lumajang hanya terbatas hingga tingkat Sekolah Rakyat. Sedangkan untuk tingkat SMP, di Jawa Timur hanya ada empat sekolah saja, yakni dua sekolah di Surabaya, satu sekolah di Probolinggo dan satu sekolah lainnya di Malang.

Romusha dan Proyek Pertahanan Jepang di Lumajang

Lumajang merupakan wilayah yang sangat strategis, potensi sumber daya alam yang melimpah serta kondisi geografis yang berbukit dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, bagi Jepang Lumajang sangat strategis untuk dijadikan pertahanan. Dimana Pertahanan tersebut digunakan untuk menghalau pasukan sekutu dari selatan. Dengan menggunakan tenaga romusha Jepang mulai membangun bunker-bunker untuk pertahanan di sepanjang pesisir pantai selatan Lumajang mulai tahun 1942 - 1944. Sejumlah bukti yang hingga kini masih ada meskipun hanya tinggal puing dan bekasnya



Foto bunker Jepang di Pandanwangi

Sumber : koleksi pribadi Lutfia Amerta Sanjiwani, S.Pd

saja, merupakan bukti sejarah bahwa Lumajang merupakan daerah yang juga memiliki pengalaman pahit pada masa penjajahan Jepang. Adapun sebaran peninggalan bunker-bunker Jepang saat ini bisa kita lihat di Desa Wotgalih (Yosowilangun), Desa Jatimulyo (Kunir), Desa Pandanwangi (Tempeh), Desa Pandanarum (Tempeh), Desa Selok Awar-awar (Pasirian), Desa Condro (Pasirian), Desa Gondoruso (Pasirian), Desa Tempursari (Tempursari). Bunker-bunker tersebut sangatlah bermanfaat bagi Jepang untuk berlindung dari serangan sekutu yang mana saat itu berpusat di Australia.

Proyek pembangunan bunker yang kurang lebih berjumlah 30 bunker, tentunya memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak sehingga Jepang gencar menyebarkan propaganda untuk menarik rakyat Indonesia menjadi Romusha. Melalui propaganda, Jepang menawarkan hal yang baru, dimana menjadi romusha adalah suatu pekerjaan yang mulai kepada negara. Dikarenakan membantu negara untuk menang dan kebebasan bagi rakyat Indonesia.

Pembangunan Lapangan Terbang Sementara Pandanwangi

Pembangunan lapangan terbang sementara Pandanwangi Kecamatan Tempeh, sebenarnya adalah proyek pembangunan yang telah dirintis oleh Belanda sebelum Jepang menguasai Lumajang. Seperti yang dituturkan oleh Sutaji, sesepuh Desa Pandanwangi yang pada masa pendudukan Jepang

sempat menjadi juru antar ransum bagi romusha. Pembangunan lapangan terbang sementara Pandanwangi telah mulai dibangun sekitar tahun 1930 oleh Belanda. Namun karena Belanda harus meninggalkan Lumajang, Jepang menersukan pembangunannya karena dinilai cukup strategis untuk kepentingan militer. Lapangan terbang Pandanwangi sangat menguntungkan bagi Jepang. Selain mempermudah distribusi persenjataan dan obat-obatan, juga berfungsi untuk tempat pengintaian yang strategis, karena lokasinya tidak jauh dari Pantai Selatan.



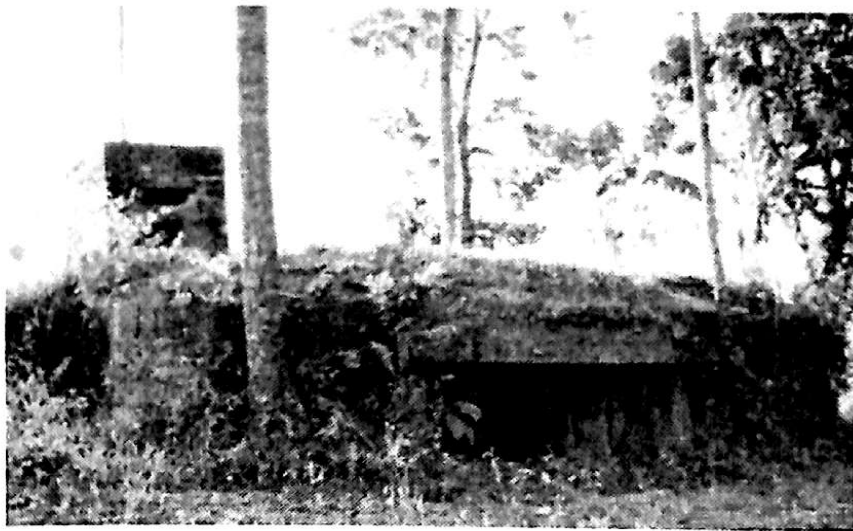
Landasan pesawat udara sementara Pandanwangi, Tempeh yang diteruskan pembangunnya oleh Jepang pada tahun 1942 3 hamparan landasan ini dipergunakan Jepang untuk distribusi sumber makanan dan obat-obatan

Sumber: koleksi DHC '45

Lapangan terbang darurat Pandanwangi dibangun pada hamparan tanah seluas kira-kira 20 ha. Saat ini sisa-sisa pondasi lapangan terbang masih ada dan belum banyak mengalami perubahan. Ada 3 hamparan sisa lapangan terbang yang tidak berubah karena warga setempat tidak berhasil membongkar pondasi yang terbuat dari bahan cor tersebut. Sedangkan sisanya,

sebagian besar dimanfaatkan warga untuk menanam tebu. Tidak banyak yang memanfaatkan sisa lapangan terbang itu, karena pondasi lapangan terbang membutuhkan peralatan berat apabila ingin membongkarnya.

Dengan mengerahkan barisan pemuda semi militer yang tergabung dalam seinendan dan dibantu oleh romusha, dikerjakanlah proyek besar itu pada awal tahun 1943. Para pekerja bukan hanya berasal dari daerah Lumajang saja, melainkan dari sejumlah daerah lainnya, seperti Probolinggo, Malang, Pasuruan, Bondowoso hingga ke daerah Bojonegoro. Selama kurang lebih sebulan, seinendan dan murid sekolah menengah asal Malang sebanyak 250 orang diwajibkan untuk mengikuti kinrohosi (kerja bakti) dan mereka ditempatkan di dua barak. Barak itu bertiang bambu, berdinding dan beratap alang-alang. Karena posisi barak berdekatan dengan pantai, pada malam hari



Bunker tempat persembunyian dan pengintaian tentara Jepang di Pandanwangi (Sumber : koleksi DHC '45)

terdengar debur ombak laut Selatan. Kondisi ini menimbulkan dampak psikologis negatif yang besar bagi seinendan.

Pembangunan Lapangan terbang dan sejumlah bunker di daerah Pandawangi, menelan ratusan korban jiwa. Mereka tewas akibat minimnya sarana penunjang kerja, buruknya gizi, barak

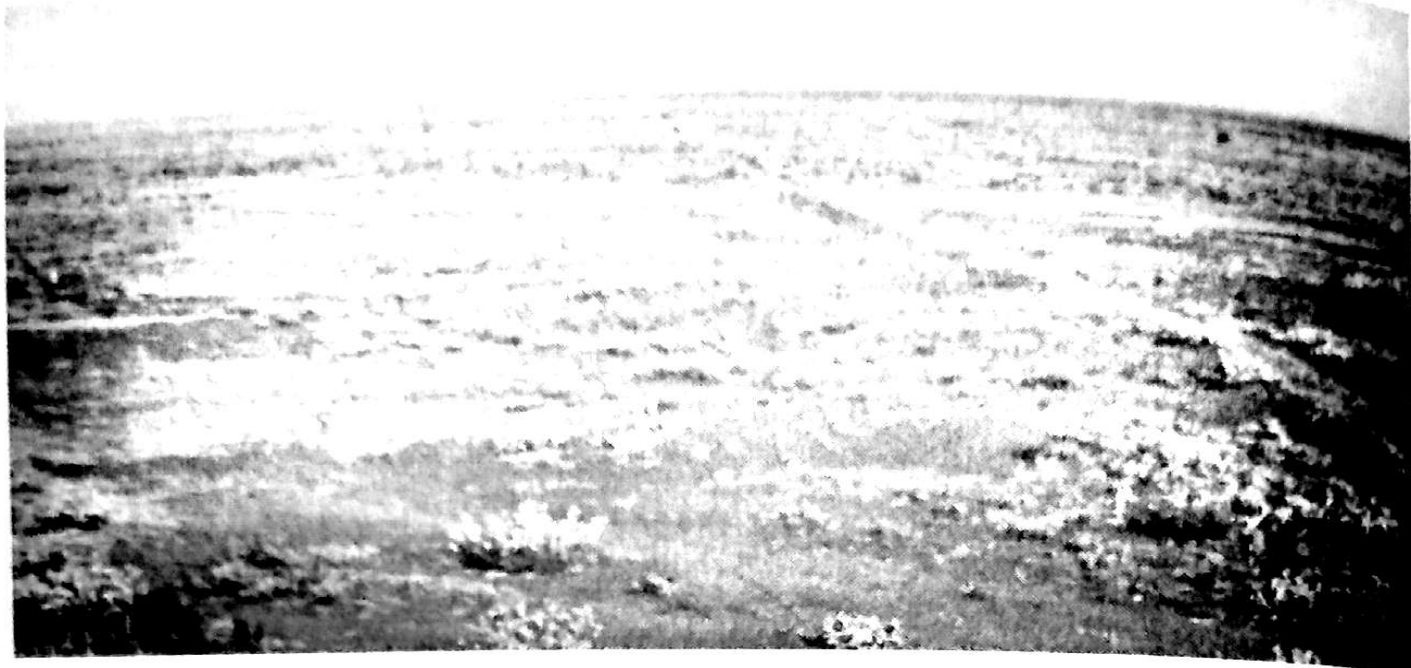
yang tidak memadai, kerasnya tekanan Jepang, serta kondisi psikologis yang semakin runyam. Untuk makan saja, mereka harus antre beberapa jam, dan sudah cukup bagus jika mereka mendapatkan jatah makanan berupa lauk ikan asin. Kondisi ini diperparah dengan buruknya air minum yang langsung mengambil dari aliran sungai setempat, tanpa dimasak terlebih dahulu. Jika malam, mereka harus tidur tanpa alas atau bahkan selimut, meskipun angin cukup kencang karena berada di daerah pantai dan suhunya sangat dingin.

Bisa dikatakan bahwa bekas pekerja atau romusha baik dari kalangan pemuda atau yang sudah tua, tidak akan bertahan lama jika mereka selamat setelah pulang dari proyek Pandawangi. Rata-rata mereka stres berkepanjangan, jadi gila tatkala mereka masih hidup. Tetapi sebagian besar lainnya, telah tewas di tempat kejadian karena kekejaman Jepang.



Bagian dalam bunker Jepang

Sumber : koleksi pribadi Lutfia Amerta Sanjiwani, S.Pd



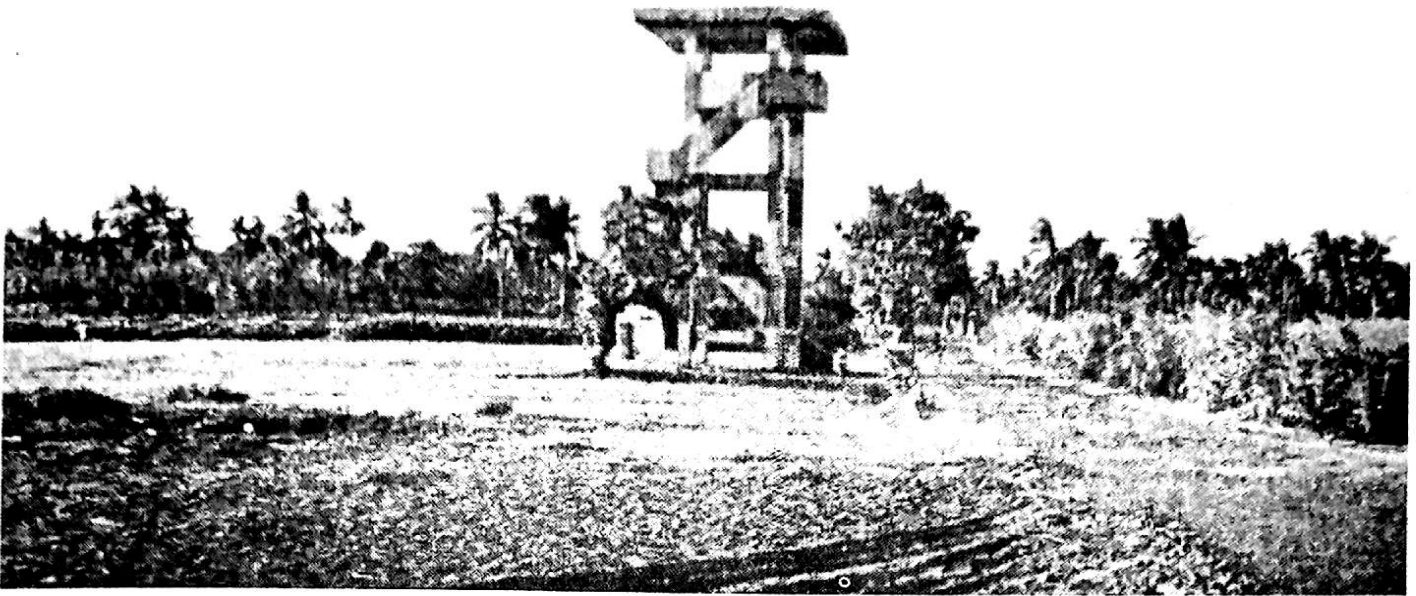
Di hamparan pantai ini sempat dibangun beberapa bunker yang kini sudah tertimbun tanah. Selain itu, dibangun pula beberapa barak tidak permanen untuk romusa dan pelajar dari Malang dan melakukan kenrohusi atau kerja bakti. Banyak diantara mereka tewas mengenaskan dan mati bunuh diri

Sumber : koleksi DHC '45



Bunker di daerah Pandanarum yang hampir tertutupi tanah. Bangunan ini memiliki kedalaman 5 meter dan menembus beberapa bunker lainnya sebagai tempat persembunyian dan pengintaian

Sumber : koleksi DHC '45



Menara yang dibangun oleh Jepang untuk mengintai ancaman serangan sekutu dari perairan Australia

Sumber : koleksi DHC '45



Balai pertemuan warga Desa Pandanarum Kec. Tempeh yang masih kokoh meski tidak banyak dimanfaatkan lagi oleh warga. Pada waktu pendudukan Jepang balai ini dipergunakan tentara Jepang untuk mengumpulkan warga guna propaganda Jepang atau untuk penyiksaan romusa dan tertangkap saat melarikan diri

Sumber : koleksi DHC '45

Proyek Pertahanan Jepang di Pasirian

Di penghujung tahun 1943, Jepang melakukan mobilisir besar-besaran di daerah yang dianggap strategis untuk menghalau sekutu, utamanya Australia yang wilayah perairannya berdekatan dengan wilayah perairan Lumajang. Pasirian adalah suatu daerah yang dianggap sangat strategis untuk membangun pertahanan. Berikut adalah sejumlah bangunan pertahanan yang dibuat Jepang dengan melibatkan ribuan romusha dari berbagai daerah yang berada di Pasirian.

Gunung Pucang Rangga

Gunung yang membujur dari utara sampai ke selatan ini, dibangun sejumlah bunker dan terowongan rahasia sepanjang kaki lereng gunung yang dapat dilihat dengan jelas, karena menghadap ke arah jalan raya. Meskipun kondisinya saat ini sudah rusak, namun dari bekas bangunannya terlihat bahwa proses pembuatannya sangatlah sulit dan penuh resiko. Selain harus melakukan penggalian di daerah curam, peralatan yang dipergunakan pada waktu itu juga sangat terbatas.



Salah satu bunker Jepang yang ada di Gunung Pucarangga

Sumber : koleksi pribadi Lutfia Amerta Sanjiwani, S.Pd

Terowongan ini dindingnya dibuat dari beton yang cukup kokoh, menjorok ke dalam gunung sepanjang 20 meter, lebar dan tingginya sekitar 5 meter dan di dalamnya dibangun cerobong udara hingga ke permukaan tanah. Rata-rata romusha yang dipekerjakan dalam proyek ini berasal dari luar daerah Lumajang. Tidak sedikit dari mereka yang mati sia-sia karena resiko pekerjaan yang sangat tidak manusiawi. Dengan cangkul dan alat seadanya, mereka menggali, membuat terowongan dan tidak jarang mereka tewas akibat reruntuhan batu besar dan tanah longsor. Selain itu, tekanan psikologis dan minimnya fasilitas serta buruknya gizi, semakin menambah penderitaan mereka.

Gunung Tambu

Gunung yang nampak dan terlihat jelas dari sepanjang jalan menuju Pasirian ini, juga menyisakan kepedihan akibat kekejaman penjajahan Jepang. Hampir sama dengan bangunan pertahanan di Pucang Rangga, rata-rata pekerjaanya berasal dari daerah luar Lumajang. Hanya saja, benteng pertahanan



Salah satu bunker Jepang yang ada di Gunung Tambu

Sumber : koleksi pribadi Lutfia Amerta Sanjiwani, S.Pd

di Gunung Tambu tidak masuk ke dalam tanah atau berupa terowongan, melainkan berada di atas tanah, berbentuk bulat dengan diameter sekitar 2 meter. Berguna untuk mengintai sekaligus sebagai tempat perlindungan tentara Jepang. Sedangkan di puncak gunung, juga dibangun

bangunan pertahanan yang cukup kokoh berupa bunker kecil, untuk mengintai gerakan musuh tatkala melintasi daerah pegunungan lain di sekitarnya, sekaligus untuk mengintai datangnya kapal-kapal perang dari wilayah laut.

Sekiranya bunker kecil di puncak Gunung Tambu ini akan ditembuskan hingga ke gunung-gunung yang lain. Namun karena Jepang terpaksa harus

meninggalkan Lumajang, akhirnya proyek ini terbengkalai. Meski demikian, tidak sedikit korban yang tewas akibat pembangunan benteng pertahanan dan pengintaian ini.

Gunung Gajah Mungkur

Sebenarnya di wilayah pegunungan Gajah Mungkur yang terletak di wilayah barat Pasirian ini akan dijadikan proyek raksasa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk kapasitas wilayah Jawa Timur. Dikenal dengan sebutan Jawa Dengki Jigiozok Semozok Gondoruso Pasirian. Lebih tepatnya, proyek ini dibangun di Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian. Dengan komando langsung dari tentara Jepang yang pada waktu itu dipimpin oleh Kolonel Arakawa. Memanfaatkan aliran sungai deras dan lebar, dibangun bendungan berkapasitas besar. Selain itu, di sekitar lokasi proyek PLTA Gondoruso ini, juga dibangun beberapa gedung penting lainnya, seperti barak, bunker, depot solar dan benteng pertahanan yang kuat. Hal ini sengaja dibangun oleh Jepang, karena lokasi Gunung Gajah Mungkur dianggap paling tepat sebagai tempat yang strategis sebagai pusat militer sekaligus pusat pertahanan. Lokasinya cukup memungkinkan, karena tempatnya di wilayah pegunungan, tetapi masih cukup banyak dijumpai daerah datar yang cukup luas.

Bendungan ini sebenarnya sudah hampir selesai pada tahun 1944, meskipun hanya dikerjakan dengan peralatan seadanya oleh romusha. Namun karena jumlah korban romusha semakin meningkat dan persediaan pekerja dari berbagai daerah juga semakin sedikit, akhirnya proyek bendungan ini dihentikan dan dialihkan untuk pengerjaan bangunan yang lain. Di sekitar bendungan dibangun gudang-gudang besar dan barak-barak sederhana untuk romusha. Ada juga bangunan untuk dapur umum serta klinik sederhana untuk kepentingan romusha. Namun kondisinya sangatlah memprihatinkan. Jatah makanan yang seharusnya dikosumsi 100 orang, terpaksa harus dibagi hingga 500 orang, dengan jatah lauk yang sangat tidak memadai. Beruntung jika ada ikan asin sebagai lauk, namun yang seringkali diterima romusha adalah nasi jagung dan gaplek.

Sedangkan klinik pengobatan, juga tidak dilengkapi dengan peralatan medis yang layak, karena sebagian besar pengobatan dilakukan dengan

cara tradisional dan dilakukan oleh para romusha lain. Jika ada pekerja yang terluka akibat reruntuhan batu atau terkena longsor, luka tersebut hanya ditutupi atau dibebat dengan pelepah daun pisang saja. Sedangkan untuk menyembuhkan luka dari dalam, mereka hanya diobati dengan ramuan jamu tradisional dari bahan yang mereka temukan di sekitar lokasi proyek.

Kira-kira 2,5 km dari Gondoruso atau tepatnya di kaki lereng Gunung Gajah Mungkur, dibangun barak besar dan sejumlah bangunan militer lain, sebagai pusat kegiatan militer Jepang. Bangunan permanen dengan kapasitas cukup luas dipergunakan sebagai kantor, beberapa bangunan barak khusus untuk tentara PETA dan tentara Jepang, dengan penjagaan cukup ketat dari para kompetai. Untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman, dibuat juga beberapa bangunan gudang sebagai tempat penyimpanan makanan dan senjata. Sedangkan untuk kebutuhan air bersih, romusha kembali dipekerjakan untuk membuat sumur besar sebanyak 3 buah dengan diameter kurang lebih 3 meter dan dengan kedalaman kurang lebih 50 meter. Tidak sedikit romusha tewas mengenaskan dalam pembuatan sumur ini, karena peralatan tidak memadai dan lemahnya kondisi fisik. Masih di tempat yang sama, ada pula terowongan yang sengaja dibangun untuk tempat pengintaian, persembunyian dan benteng pertahanan hingga menembus Pantai Selatan. Namun pengerjaannya belum selesai, karena pendeknya waktu sampai Jepang harus meninggalkan bumi pertiwi. Terowongan itu memiliki dinding dari beton yang cukup kuat, dengan tinggi dan lebar sekitar 5 meter dan panjang mencapai hampir 200 meter, lengkap dengan beberapa cerobong udara untuk



*Bangunan yang tinggal puing ini adalah rumah uang tentara Jepang. Dipergunakan sebagai tempat penyimpanan uang dan harta benda Jepang dari hasil rampasan. Sempat menjadi sasaran massa saat Jepang menyerah, namun tidak ditemukan uang atau harta apapun
Sumber : koleksi DHC '45*

sirkulasi. Sepanjang sekitar 50 meter telah berhasil dibangun jalan lori untuk mengangkut peralatan, tanah dan batu dari hasil penggalian.

Sempat juga dibuat penerangan di dalam terowongan. Hanya dikerjakan dengan peralatan sederhana, kondisi fisik yang lemah, tekanan psikologis yang hebat selain akibat kekejaman tentara Jepang, banyaknya korban mati akibat reruntuhan batu dan longsor serta penyakit yang tidak mendapat perawatan dengan baik, semakin menambah penderitaan romusha. Tidak sedikit pula korban tewas di dalam terowongan akibat pengapnya udara. Belum lagi akibat gelapnya terowongan, ada pula yang mati mengenaskan karena tertabrak lori.

Menurut Kopral Soemali, saksi hidup yang pada penyusunan buku ini telah berusia 78 tahun, proyek PLTA dan terowongan ini terhenti semenjak terjadinya longsor di akhir masa penjajahan Jepang. Pada waktu itu, Soemali yang kebetulan rumahnya dipergunakan sebagai dapur umum dan penginapan sementara romusha dari luar Lumajang, dua lori dan ratusan romusha tewas seketika dalam peristiwa tanah longsor tersebut, karena terjebak di dalam terowongan. Tidak ada upaya sama sekali dari pihak Jepang untuk membebaskan mereka. Bahkan tidak lama setelah kejadian itu, tentara Jepang tidak lagi meneruskan proyek tersebut.

Tidak jauh dari lokasi terowongan, Jepang juga membangun depo minyak dengan dua tangki solar yang ditanam di dalam tanah. Solar yang disimpan di depo ini biasanya diisi setiap seminggu sekali, dan diambil untuk keperluan kendaraan Jepang serta penerangan karena pada waktu itu minyak tanah masih jarang ditemui.



Depo solar yang dibangun oleh Jepang di Gondoruso, Pasirian. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan solar untuk keperluan kendaraan perang Jepang ataupun untuk penerangan jalan, pengerjaan proyek PLTU Gondoruso.
Sumber: koleksi DHC '45



*Markas kediaman komandan tentara Jepang di Pasirian, Kolonel Arakawa
(Sumber : koleksi DHC '45)*

Jika dirata-rata, setiap harinya sekitar 20 romusha mati mengenaskan. Padahal pembangunan proyek pertahanan Gondoruso berjalan hampir 2 tahun lamanya. Proyek ini adalah proyek pembunuhan masal yang lebih tepat jika disebut dengan "Gondorusuh" artinya bau tidak sedap. Sayangnya, saat ini terowongan maut tersebut telah tertutup oleh longsor tanah sedalam 10 meter, sehingga tidak terlihat lagi sisanya. Sedangkan bendungan yang rencananya akan dipergunakan sebagai proyek PLTA, juga telah rusak terkena terjangan lahar Gunung Semeru pada waktu meletus. Namun sejumlah bangunan masih terlihat sisanya, dan tidak banyak dipergunakan oleh warga sekitar. Sisa bangunan yang masih ada seperti bekas tangki solar (depo minyak), rumah uang Jepang yang dipergunakan sebagai tempat penyimpanan uang tentara Jepang, dan barak tentara Jepang serta kediaman Komandan tentara Jepang di Pasirian, Kolonel Arakawa yang kini tinggal puing-puingnya saja.

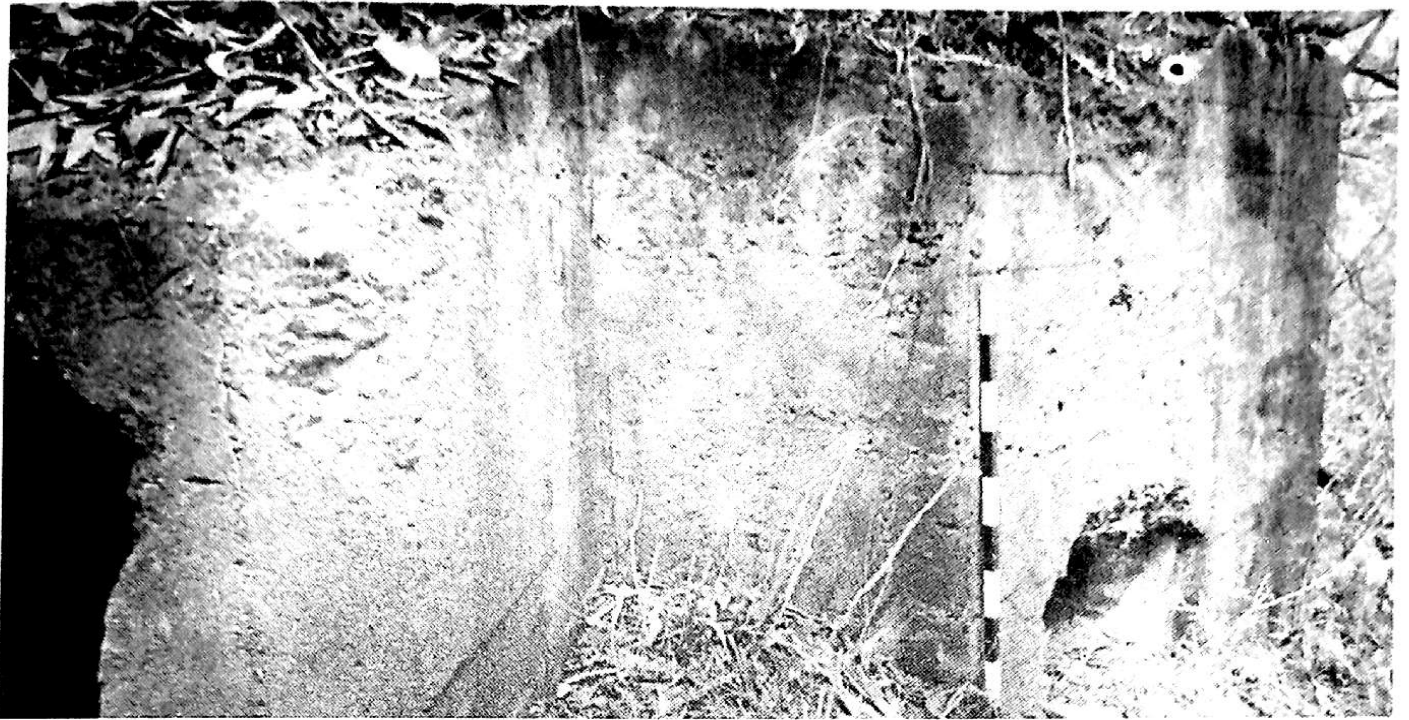
Bangunan Pertahanan di Tempursari dan sekitarnya

Pembangunan benteng pertahanan ini cukuplah panjang dan melibatkan ribuan romusha. Ada sekitar seribu orang lebih yang diterjunkan untuk

pembangunan bunker sekaligus membangun jalan. Dibawah pimpinan tentara Jepang bernama Haraki, pembangunan proyek melibatkan romusha dari daerah sekitar Tempursari dan sebagian lainnya berasal dari Batu-Malang. Pengerjaan proyek dilakukan sekitar penghujung tahun 1943, bunker atau daerah perlindungan bawah tanah dibangun membentang mulai Desa Tegal Banteng yakni di Gunung Kukusan sampai Karang Menjangan, dan dari Gunung Kursi sampai Laut Selatan. Sedangkan pembangunan jalan, dimulai dari Taman Ayu sampai Tempursari dan Pucang Sari sampai Tempursari.

Proyek perlindungan sepanjang itu, sama sekali belum pernah dimanfaatkan hingga Jepang terpaksa meninggalkan Lumajang, karena sempat terjadi pemberontakan romusha hingga berlarut-larut. Pada awalnya, romusha dengan mandor besar 2 orang dan dibantu mandor lain 20 orang masih mendapatkan upah, meskipun jumlahnya hanya seperempatnya saja dari yang dijanjikan semula. Romusha yang berasal dari daerah Tempursari setiap hari masih bisa pulang ke rumahnya masing-masing dan yang dari luar daerah, disediakan barak khusus. Namun setelah berjalan hampir 2 bulan, ternyata romusha tidak menerima upah sama sekali dan justeru beban pekerjaannya selalu ditambah.

Mendengar kabar bahwa di Blitar telah terjadi pemberontakan tentara PETA di Blitar yang dipimpin Soerjadi, akhirnya turut menyulut amarah dan keberanian romusha di Tempursari. Pada pertengahan tahun 1944, terjadilah pemberontakan yang dikenal dengan "Pemberontakan Ronggolawe". Pemimpin pemberontakan adalah tentara PETA Pasirian bernama Ronggo, melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang. Karena keterbatasan senjata dan lemahnya kondisi fisik romusha yang terlibat dalam pemberontakan itu, aksi ini dapat ditangani oleh Jepang. Tidak sedikit pejuang dari romusha yang gugur, utamanya dari daerah Tempursari dan beberapa dari daerah lain. Namun akibat pemberontakan itu, pekerjaan proyek menjadi terhambat. Istilah Ronggolawe sendiri diambil dari sebuah kisah pada jaman kerajaan Majapahit dengan pemberontakan Ronggolawe.



Bunker Jepang di atas bukit di Tempursari

Sumber : koleksi pribadi Lutfia Amerta Sanjiwani, S.Pd

BAB II

Keterpurukan vs Lahirnya Militansi

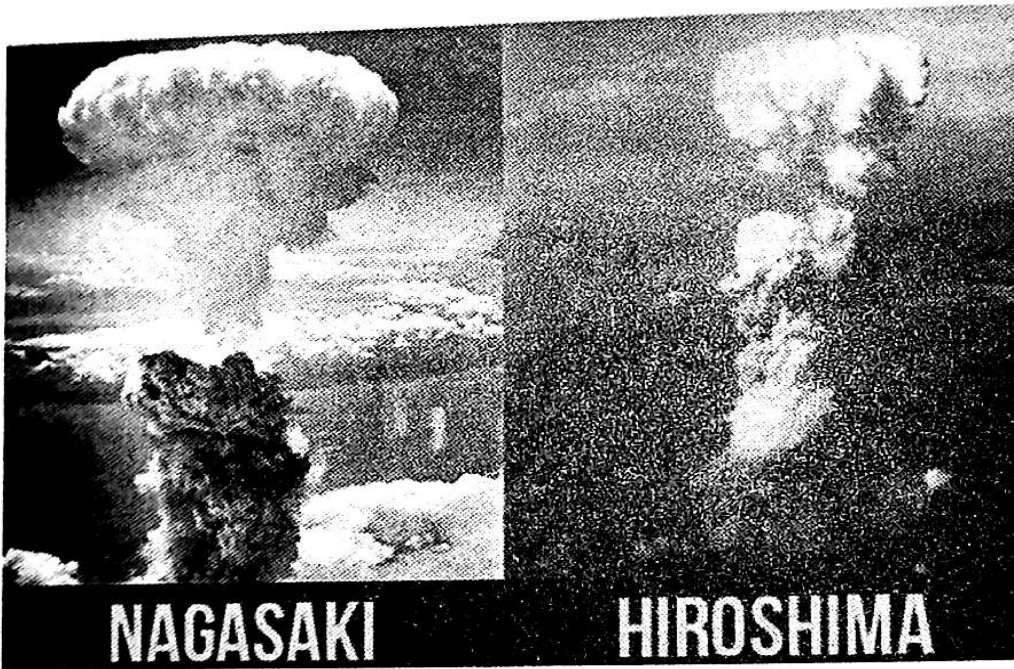


Foto Bom Atom Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah telak

Sumber : <http://menitdunia.blogspot.com/2016/12/20-fakta-menarik-tentang-bom-atom.html>

Tidak banyak yang bisa dilakukan jika ketidakberdayaan muncul seiring dengan gencarnya tekanan dari pihak luar. Namun itulah kondisi yang terjadi setelah dikumandangkannya Proklamasi 17 Agustus 1945. Kekalahan Jepang dari Sekutu setelah bencana buatan di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945, tidak serta merta menjadikan Indonesia merdeka. Pada pertemuan antara Ir. Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat di

Vietnam bersama Marsekal Terauchi, salah satu perwakilan militer Jepang untuk wilayah Asia Pasifik. Pihak Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Secara politis, tentu saja Soekarno menyambut janji Jepang itu dengan dilematis, karena Jepang tidak akan mungkin begitu saja melepas Indonesia untuk merdeka. Sementara di sisi lain, posisi Jepang sudah semakin terpuruk. Jika dipaksakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Soekarno khawatir akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran, dan diperkirakan pasukan Indonesia tidak akan bertahan lama dalam medan pertempuran. Tentara Indonesia hanya mengenyam sedikit keahlian berperang, disamping persenjataan yang juga terbatas.

Salah satu tokoh perjuangan bawah tanah, Sutan Sjahrir telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu pada 9 Agustus 1945. Tentu saja berita ini cepat tersiar ke tokoh pergerakan lainnya dan beberapa pertemuan segera dilakukan. Salah satu kebulatan tekad yang berhasil diambil dari tokoh pergerakan bawah tanah adalah menolak kemerdekaan yang diberikan dan dijanjikan oleh Jepang, karena kondisi Jepang sudah diambang batas kekalahan. Meski secara resmi Jepang baru menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, namun pada tanggal 14 Agustus setibanya Soekarno dari Vietnam, para tokoh pergerakan bawah tanah memaksa mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena kekhawatiran akan terjadi pertempuran dalam skala besar, Soekarno kurang sependapat dengan desakan sejumlah tokoh pergerakan tersebut. Terlebih, hingga tanggal 15 Agustus 1945 tentara Jepang dengan diperkuat pasukan angkatan lautnya, masih berkuasa di Indonesia. Jepang belum meninggalkan Indonesia karena rencana penyerahan kedaulatan kepada Indonesia belum diwujudkan.

Tokoh pergerakan bawah tanah-pun mulai kehilangan kesabaran, dan akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, mereka menculik Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok, yang kemudian peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Rengasdengklok. Sutan Sjahrir bersama Chairul Shaleh serta beberapa tokoh pergerakan yang lain, akhirnya berhasil meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang tidak mungkin melakukan perlawanan lagi, karena telah menyerah kepada Sekutu. Mereka juga meyakinkan Soekarno dan Hatta

Vietnam bersama Marsekal Terauchi, salah satu perwakilan militer Jepang untuk wilayah Asia Pasifik. Pihak Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Secara politis, tentu saja Soekarno menyambut janji Jepang itu dengan dilematis, karena Jepang tidak akan mungkin begitu saja melepas Indonesia untuk merdeka. Sementara di sisi lain, posisi Jepang sudah semakin terpuruk. Jika dipaksakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Soekarno khawatir akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran, dan diperkirakan pasukan Indonesia tidak akan bertahan lama dalam medan pertempuran. Tentara Indonesia hanya mengenyam sedikit keahlian berperang, disamping persenjataan yang juga terbatas.

Salah satu tokoh perjuangan bawah tanah, Sutan Sjahrir telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu pada 9 Agustus 1945. Tentu saja berita ini cepat tersiar ke tokoh pergerakan lainnya dan beberapa pertemuan segera dilakukan. Salah satu kebulatan tekad yang berhasil diambil dari tokoh pergerakan bawah tanah adalah menolak kemerdekaan yang diberikan dan dijanjikan oleh Jepang, karena kondisi Jepang sudah diambang batas kekalahan. Meski secara resmi Jepang baru menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, namun pada tanggal 14 Agustus setibanya Soekarno dari Vietnam, para tokoh pergerakan bawah tanah memaksa mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena kekhawatiran akan terjadi pertempuran dalam skala besar, Soekarno kurang sependapat dengan desakan sejumlah tokoh pergerakan tersebut. Terlebih, hingga tanggal 15 Agustus 1945 tentara Jepang dengan diperkuat pasukan angkatan lautnya, masih berkuasa di Indonesia. Jepang belum meninggalkan Indonesia karena rencana penyerahan kedaulatan kepada Indonesia belum diwujudkan.

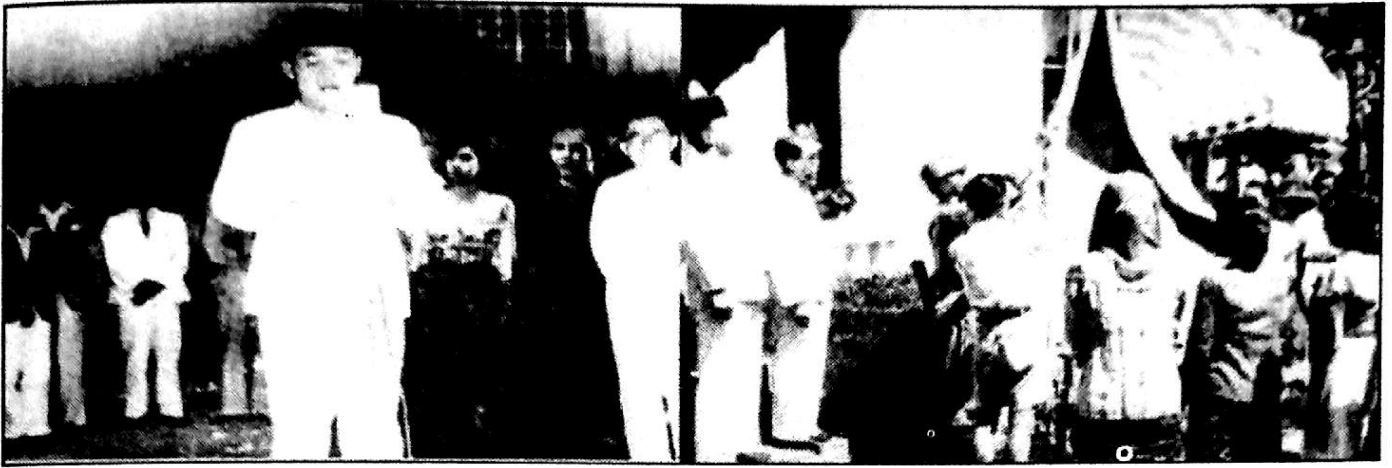
Tokoh pergerakan bawah tanah-pun mulai kehilangan kesabaran, dan akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, mereka menculik Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok, yang kemudian peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Rengasdengklok. Sutan Sjahrir bersama Chairul Shaleh serta beberapa tokoh pergerakan yang lain, akhirnya berhasil meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang tidak mungkin melakukan perlawanan lagi, karena telah menyerah kepada Sekutu. Mereka juga meyakinkan Soekarno dan Hatta

bahwa pejuang Indonesia telah siap melakukan perlawanan jika kemungkinan dan kekhawatiran Soekarno itu benar-benar terjadi.

Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan Jenderal Moichiro Yamamoto dan bermalam di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Dari pertemuan prajurit kepercayaan Komandan Jepang di Jawa inilah, akhirnya Soekarno menjadi yakin, bahwa Jepang tidak mungkin lagi dapat memberikan kemerdekaan kepada Indonesia karena telah menyerah dan tidak memiliki kewenangan memberikan kewenangan kepada pihak manapun. Secara de facto bisa dikatakan bahwa pada waktu itu Indonesia dalam kondisi status quo. Yakin bahwa pertumpahan darah tidak mungkin terjadi, maka pada malam itu juga Soekarno, Hatta dan beberapa anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menyiapkan teks proklamasi yang kemudian dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tentara Pembela Tanah Air, kelompok muda radikal, dan rakyat Jakarta mengorganisasi pertahanan di kediaman Soekarno. Selebaran kemudian dibagi-bagikan berisi tentang pengumuman proklamasi kemerdekaan.

Sementara itu di Jakarta keadaan biasa-biasa saja tanpa ada sesuatu yang istimewa utamanya di kalangan masyarakat awam, khususnya yang ada di daerah atau pelosok. Hal ini terjadi karena penyampaian informasi tidaklah begitu cepat seperti saat sekarang. Secara de facto, sebenarnya kekuasaan di Indonesia pada waktu itu masih berada di tangan tentara Jepang, sehingga ketentuan larangan untuk mendengarkan siaran radio, khususnya dari luar negeri masih diberlakukan. Rakyat masih menggambarkan bahwa tentara Jepang masih kuat dan utuh, dan berita kemerdekaan masih simpang siur di kalangan masyarakat awam.

Proklamasi kemerdekaan baru dapat diinformasikan secara luas pada jam 19.00 melalui Hosokyoku (studio radio) Jakarta. Meskipun dijaga ketat oleh tentara Jepang, namun patriot-patriot perjuangan dibawah pimpinan Bachtiar Lubis, Suprpto, Yusuf Ronodipoero dan Syahrudin berhasil menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan ini secara luas ke seluruh tanah air, meskipun tidak secara live.



Proklamasi dan Pengibaran Bendera Merah Putih di Jalan Pegangsaan Timur No. 56

Sumber : olahan pribadi

Proklamasi di Lumajang

Penerimaan informasi kemerdekaan di Kabupaten Lumajang baru diterima pada tanggal 17 Agustus pada jam 23.00. Informasi resmi tersebut disampaikan oleh dr. Soemo Widigdo mantan anggota Tjuo Sangiin Malang-Syu setelah mengikuti sidang di Malang. Melalui rapat dengan sejumlah pemimpin Lumajang, akhirnya rapat memutuskan :

1. Rakyat Lumajang menyambut gembira Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan siap sedia membela dengan jiwa dan raga
2. dr. Koesnadi dan Bapak Sosromihardjo segera menghubungi Bapak Abubakar (Bupati Lumajang) agar tidak terjadi kesenjangan atau stagnasi pemerintahan
3. dr. Soedjono mendapat tugas menghubungi pimpinan PETA untuk dalam waktu singkat melepaskan diri dari pengawasan Jepang
4. Bapak Poernomosidi (Kepala Polisi) mendapat tugas menghimpun kekuatan polisi dan pemuda, dan siap menerima komando dari dr. Soedjono apabila usahanya berhasil
5. Rapat berikutnya akan diadakan tanggal 19 Agustus 1945 bersama tokoh-tokoh pemuda, adapun jam dan tempat ditentukan oleh Poernomosidi begitupun tokoh-tokoh yang diundang.

Namun, sebelum informasi tersebut dibahas di kota Lumajang, terdapat peristiwa menarik di Pasirian dan sekitarnya, karena informasi mengenai

kemerdekaan ini telah ditandai sebelumnya. Pasukan Jepang telah mengumpulkan pasukan PETA baik Daidan yang ada di Rowobujel (Labruk Lor) maupun di Condro (Pasirian) dalam apel pagi. Pada kejadian yang berlangsung pada 16 Agustus 1945 itu, tentara Jepang memerintahkan agar senjata yang dimiliki oleh PETA dan Daidan, untuk dikumpulkan di dalam gudang. Selanjutnya tentara Jepang dalam apel pagi itu berpidato, yang isinya

".....tuan-tuan, tidak lama lagi negara tuan-tuan akan menerima kemerdekaan..."

Tidak lama sesudah apel pagi itu, senjata yang telah dikumpulkan di gudang kemudian diperiksa kembali dan selanjutnya langsung diangkut dengan truk ke Malang. Anehnya pada hari itu juga, sejumlah perwira Jepang juga menyatakan bahwa Perang Asia Timur Raya telah selesai dan dalam pernyataannya dihadapan pasukan PETA, pasukan PETA diperbolehkan untuk meninggalkan daidan-nya masing-masing. Pernyataan ini menandakan bahwa pasukan yang ada di Rowobujel dan di Condro telah dibubarkan. Opsir atau komandan Daidan yang ada pada waktu itu adalah : Chudancho : Moh. Wijono, Moch. Yasir. Sudhancho (Dan Ton) : Soewandak, Soekertijo, Soewignyo. Budancho (Dan Ru) : Soeharjo, Roewono, Supari, Abdullah Salim, Abd. Rauf dan Aspari. Usai pernyataan Jepang atas pembubaran pasukan tersebut, tentara PETA pulang tanpa dibebani syarat apapun. Demikian halnya yang terjadi pada pasukan PETA yang bertugas di Gunung Sawur Candipuro.

Selain itu, salah satu tokoh pergerakan dan berpengaruh dari Pasirian, yakni R. Handoko Kusumo Muryadi pada tanggal 15 Agustus 1945 telah memberikan instruksi rahasia kepada kader-kadernya melalui anggota Pencak Silat PO. bahwa tidak lama lagi Indonesia akan merdeka dan untuk itu rakyat supaya melakukan persiapan. Informasi mengenai kemerdekaan ini disampaikan secara langsung kepada beberapa tokoh perjuangan Lumajang seperti N. Mudayin, R. Sudjono Abdul Kahar, Abdul Wachid, Imam Muhadi dan Manan. Kader-kader Muryadi sebelumnya telah banyak mendapatkan pendidikan militer dari tentara Jepang, seperti Bachroen Poerwoatmodjo

sebagai pemimpin Keibodan, Masruchin sebagai Sudanco PETA, Masjari sebagai Seinendan dan Amir Supardi sebagai pasukan jibakutai.

Kemudian pada pagi hari tanggal 19 Agustus 1945, datanglah dua orang utusan dari Jakarta yang membawa informasi resmi mengenai kemerdekaan RI dengan mengendarai sepeda motor. Mereka adalah Bapak Abdoel Karim (Perwira Polisi asal Lumajang) dan Bapak Soebadi (Perwira Polisi sekaligus Juru Bahasa Sidokan). Kemudian pada malam hari, jam 22.00, bertempat di rumah Bapak Abdoel Karim di Desa Jogotrunan, dilaksanakan rapat untuk menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 17 Agustus. Rapat ini berakhir pada jam 03.00, dan Imam Sudja'i (Daidanco asal Lumajang yang bertugas di Malang) tidak dapat hadir karena pada saat itu sedang melakukan perjalanan dari Jakarta. Hasil rapat lanjutan itu adalah :

1. Mendukung keputusan rapat 18 Agustus (pada tanggal 17 Agustus malam, atau masuk pada tanggal 18 Agustus).
2. Menyetujui pembubaran organisasi pemuda bentukan Jepang (Keibodan, Keibotai, Seinendan) dan pembentukan organisasi baru Pemuda Rakyat Indonesia (PRI) sebagai wadah segenap potensi pemuda dengan coordinator Bapak Poernomosidi dan dr. Soedjono.
3. Para kader pemuda ditugasi menyebarkan berita Proklamasi Indonesia Merdeka dan mengenakan Lencana Merah Putih serta siap menerima perintah setiap saat.
4. Hongbu dan Kamar Bola (saat ini adalah Gedung dr. Soedjono) ditetapkan sebagai markas dan tempat kegiatan pemuda.

Peralihan Kekuasaan

Meski perlawanan relatif tidak terjadi di Lumajang dalam rangka pengalihan kekuasaan, namun pelucutan tentara Jepang serta perampasan senjata dan pengambilalihan markas Jepang oleh tokoh pejuang Indonesia terjadi cukup menegangkan. Pada tanggal 25 Agustus 1945 sekitar jam 03.00, para pemuda dan rakyat telah mengepung markas tentara Jepang yang ada di Hotel Yamato atau Hotel Merdeka, rumah Kwee Gwat Hien dan rumah Njoo Peck Hook. Dengan membawa senjata yang beraneka ragam seperti clurit, pedang, golok, bambu runcing dan senjata tradisional lain, mereka menunggu

komando pemimpin pergerakan Lumajang untuk melakukan penyerbuan. Sejumlah tokoh pergerakan berusaha menghubungi perwira-perwira Jepang melalui telepon agar mereka segera menyerah. Tentara Jepang tidak merespon tuntutan tersebut dengan cepat, sehingga menimbulkan suasana semakin menegangkan karena beberapa pemuda dan rakyat sudah tidak sabar lagi melampiaskan amarahnya kepada tentara Jepang. Dengan meneriakkan yel-yel kemerdekaan, mereka terus mengepung tiga bangunan penting yang dikuasai Jepang. Namun emosi pemuda dan rakyat ini masih dapat dibendung oleh tokoh-tokoh pergerakan Lumajang, karena memang tidak ada instruksi dari pusat untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang.

Jawaban tentara Jepang baru diberikan pada 26 Agustus 1945 jam 11.00 siang. Tentara Jepang meminta untuk berunding, dan dari pihak pemuda yang ditunjuk adalah M. Wijono dengan didampingi beberapa mantan PETA. Perundingan dilakukan selama satu jam, dan menghasilkan beberapa kesepakatan, yakni :

1. Jepang setuju terhadap peralihan kekuasaan di Lumajang.
2. Tugas keamanan diserahkan kepada pemuda dengan jaminan keamanan bagi seluruh tentara Jepang yang berada di Lumajang.
3. Setuju menyerahkan seluruh senjata dan amunisinya kepada pihak pemuda.
4. Meminta agar pada hari itu, bendera Jepang di markas Kenpetai (rumah Kwee Gwat Hien) masih diperbolehkan untuk dikibarkan.

Kemudian pada jam 14.00 serah terima senjata dan amunisi selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih di Hotel Merdeka dengan dipimpin oleh M. Wijono. Peristiwa menengangkan dalam pelucutan senjata serta penyerahan kekuasaan Jepang, juga sempat terjadi di Pasirian. Berselang beberapa hari setelah proklamasi dikumandangkan, pejuang Pasirian membentangkan lori, tepat di pertigaan stasiun Pasirian. Para pemuda dan rakyat berusaha menghalangi truk Jepang yang hendak melintas. Pada malam harinya, 2 truk tentara Jepang melintas dari arah barat atau dari arah Petung Ombo. Karena terhalang oleh lori, akhirnya 2 truk tersebut berhenti dan tentaranya berhasil dilucuti oleh beberapa pasukan pergerakan.

Tanpa perlawanan berarti, beberapa pasukan Jepang yang ada di truk-truk tersebut langsung digiring ke Kantor Kawedanan Pasirian. Dari hasil pelucutan itu, berhasil dirampas 7 pucuk senjata laras panjang, 1 pistol dan 1 pedang samurai.

Beberapa hari setelah peristiwa itu, Muryadi memerintahkan untuk melakukan pelucutan senjata di markas Jepang Jawadengki-Gondoruso Pasirian. Dengan dibantu oleh rakyat sipil, sejumlah pasukan pergerakan menumpangi lori yang dimasini oleh Ba'i langsung meluncur ke lokasi. Sejumlah pasukan yang lain juga ada yang menaiki motor hasil rampasan. Muryadi mengendarai sebuah sedan Chevrolet warna hitam yang disopiri oleh Suradi.

Setelah sampai di Jawadengki Gondoruso, Muryadi bersama pasukan yang lain termasuk Masruchin dan Amir Supardi masuk dan melakukan perundingan dengan pihak Jepang. Sedangkan pasukan dari kalangan sipil dan beberapa orang pasukan pergerakan berjaga-jaga di luar untuk mengantisipasi kemungkinan buruk terjadi. Meskipun mendapat pengawalan yang ketat, pihak Jepang yang dipimpin oleh Kolonel Arakawa menyerah dan bersedia dilucuti, lalu pemuda dan rakyat langsung masuk ke barak tentara Jepang untuk melucuti senjata dan perlengkapan militer lainnya.

Sedangkan di sejumlah wilayah lain di Lumajang, para tokoh pemuda baik dari sipil ataupun bekas heiho, berkeliling ke sejumlah kantor-kantor pemerintahan untuk menurunkan bendera Hinimaru (bendera Jepang) dan menggantinya dengan bendera Merah Putih. Demikian juga dengan tulisan-tulisan Jepang, dihapus dan diganti dengan tulisan bahasa Indonesia dengan peralatan seadanya. Bagi mereka tulisan dan simbol Jepang sangat erat dengan kekejaman dan penindasan dan harus segera disingkirkan agar luka batin akibat penindasan itu dapat digantikan dengan semangat baru untuk mempertahankan kemerdekaan.

Setelah semua rangkaian kejadian menegangkan tersebut, tentara Jepang mematuhi perintah komando yang ada di Surabaya untuk meninggalkan Lumajang. Dengan melakukan konvoi, mereka meninggalkan Lumajang. Sebagian tentara heiho juga ada yang mengikuti konvoi tersebut dan beberapa diantaranya mengikuti tentara Jepang melakukan penyerahan di lautan Pasifik.

Bahkan ada juga yang ikut tentara Jepang menuju Australia. Namun belum tiba ke daerah tujuan, mereka ditangkap Sekutu, setelah sebelumnya mereka menderita kelaparan akibat minimnya ransum di atas kapal. Beberapa dari tentara heiho ini bahkan ada yang direkrut Sekutu untuk menumpas tentara Jepang di kawasan Asia. Tidak hanya itu, ada sebagian tentara eks heiho yang setelah ditangkap Sekutu, kemudian diserahkan kepada NICA (Belanda) untuk turut melakukan penyerangan terhadap wilayah bekas Hindia Belanda. Mereka bertempur melawan pejuang Indonesia atau bisa disebut sebagai penghianat bangsa.

Sementara penyerahan kekuasaan pemerintahan di Kabupaten Lumajang tidak banyak mengalami kendala. Bupati Abubakar Kartowinoto tetap menjadi Bupati Lumajang setelah proklamasi kemerdekaan. Sedangkan untuk jabatan patih, diangkatlah salah satu tokoh pergerakan Lumajang, yakni Sastrodikoro, Detasiren dari Kabupaten Pasuruan. Tata pemerintahan tidak banyak mengalami perubahan, hanya nama-nama lembaganya saja disesuaikan dengan istilah Indonesia. Sebuah lembaga baru dibentuk, yakni Komite Nasional Indonesia (KNI) sebagai perpanjangan tangan dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang merupakan lembaga perwakilan rakyat atau yang sebelumnya disebut dengan istilah Jawa Hookokai. Pada waktu itu, Ketua KNI Lumajang adalah Sosromihardjo.

Sejarah Lahirnya Angkatan Perang RI

Pembentukan angkatan perang Republik Indonesia sebenarnya sangat memungkinkan dilakukan setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Kekuatan militer rakyat Indonesia yang tergabung dalam PETA diperkirakan telah mampu diorganisir menjadi angkatan perang. Tentara Pembela Tanah Air (PETA) sebesar kurang lebih 60 Daidan (setingkat batalyon), ribuan prajurit heiho, dan lain-lain (Himawan S., 2006). Presiden Soekarno tidak menginginkan pemerintahan Indonesia yang baru berdiri dan dalam waktu yang tidak terlalu lama telah memiliki angkatan perang, akan dicurigai menjalankan misi politik untuk kepentingan Jepang. Jika hal ini dipaksakan, Indonesia akan dianggap sebagai penjahat perang karena turut bersekutu dengan Jepang. Terlebih pada bulan September 1945, Sekutu telah mengumumkan akan datang secara resmi

ke Indonesia dalam rangkaian tugasnya untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang serta membebaskan interniran (tawanan) Belanda yang masih berada di Indonesia. Sebenarnya Presiden Soekarno tidak menginginkan posisi Indonesia akan terjepit dalam kepentingan antara Sekutu dan Jepang. Presiden Soekarno juga tidak menginginkan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan akan dianggap sebagai hadiah Jepang, karena sebagian besar potensi angkatan perang yang dimiliki merupakan hasil pelatihan Jepang.

Namun di sisi lain, Presiden Soekarno juga memikirkan bahwa pemerintahan akan sangat mudah tergoyahkan jika tidak memiliki angkatan perang, karena Belanda sebagai salah satu kekuatan sekutu masih menganggap bahwa Indonesia adalah wilayah jajahannya yang telah direbut Jepang. Akhirnya Presiden Soekarno mengambil inisiatif jalan tengah, yakni dengan membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP), yang dalam tugasnya menaungi Badan Keamanan Rakyat (BKR). Melalui keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 22 Agustus 1945 menyebutkan bahwa BKR bukanlah organisasi ketentaraan, melainkan suborganisasi dari BPKKP (Himawan S, 2006). Tugas BPKKP dan BKR adalah selaras, yakni untuk menjamin rakyat yang menderita akibat peperangan sekaligus memelihara keamanan rakyat. Tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban inilah yang sebenarnya menjadi tugas utama BKR. Pernyataan ini dipertegas oleh Presiden Soekarno dalam pidato radio tanggal 23 Agustus 1945 yang cuplikannya adalah

".....Karena itu, saya mengharap kepada kamu sekalian, hai prajurit-prajurit bekas PETA, heiho, pelaut, serta pemuda lain untuk sementara waktu masuklah dan bekerjalah didalam Badan Keamanan Rakyat. Percayalah, nanti akan datang saatnya kamu dipanggil menjadi prajurit didalam tentara kebangsaan Indonesia...." (Soedianto S dan Abdoelkahar, 2000).

Namun ternyata perwujudan dari pembentukan BKR tersebut tidak lagi sesuai dengan rencana awalnya. Di daerah-daerah, BKR dibentuk atas semangat juang seluruh elemen kekuatan rakyat yang menginginkan kemerdekaan Indonesia dapat terjaga dengan baik. Bahkan sebelum BKR ini dibentuk secara resmi di daerah-daerah, mereka telah melakukan pendudukan di sejumlah kantor-kantor yang sebelumnya diduduki Jepang serta merampas

persenjataan dan peralatan perang lainnya. Menurut Letnan Kolonel Shizuo Miyamoto, seorang perwira staf Tentara XVI Jepang, senjata yang jatuh ke tangan Indonesia di Jawa Timur saja kurang lebih 19.000 pucuk senapan, 422 pucuk senapan mesin ringan, 212 pucuk senapan mesin berat, 17 meriam artileri, 63 pucuk mortir, 16 tank, 1.309 kendaraan pengangkut, dan lain-lain (Anthony Reid and Oki Akira, editors). Secara de facto, BKR bukan lagi menjadi pemelihara keamanan dan membantu korban peperangan, melainkan telah menjadi sebuah organisasi angkatan perang yang menjadi penopang lahirnya organisasi militer dalam mempertahankan kemerdekaan.

Pada tanggal 26 Agustus 1945, Imam Sudja'i seorang tokoh pergerakan yang juga mantan tentara PETA Lumajang yang pada waktu itu menjabat sebagai Daidancho (Dan Yon) di Malang, berinisiatif untuk mengumpulkan eskponen PETA Jawa Timur. Melalui sebuah rapat yang diselenggarakan di rumahnya di Jl. Tennis 28 Malang, sejumlah mantan pasukan PETA dan beberapa warga sipil turut hadir. Mereka adalah Bupati Malang RA. Syam, Walikota Malang Sardjono, Kepala Polisi Malang Abdurrachman, wakil dari pemuda Susilo dan seorang ahli hukum Mr. Abdul Wahab. Sedangkan dari unsur tentara PETA yang nantinya adalah pemrakarsa BKR di daerahnya masing-masing, Sudarsono dari Probolinggo, dr. Soedjono dari Lumajang, dan Poerwowijono dari Pasuruan. Imam Sudja'i sendiri akhirnya ditunjuk sebagai Ketua BKR Malang (Soedianto S. dan Abdoelkabar, 2000). Imam Sudja'i sebelum menjabat sebagai Daidancho di Malang dan aktif sebagai tentara PETA, adalah seorang tokoh pemuda nasionalis dan mantan Ketua Serikat Islam di Lumajang. Ia dikenal sebagai tokoh yang memiliki wawasan luas dengan dasar keagamaan dan nasionalis yang tinggi.

Pembentukan BKR di Lumajang

Sebelum BKR dibentuk, para pemuda dari berbagai wilayah di Kabupaten Lumajang telah diundang untuk mendaftarkan diri dalam sebuah organisasi yang bertugas mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 24 Agustus 1945, sebelum penyerahan kekuasaan Jepang kepada para pemuda Lumajang, Markas Pemuda bekerjasama dengan Pemerintah dan Kepolisian, memanggil pemuda-pemuda bekas PETA, heiho dan organisai kepemudaan lain untuk

berkumpul di kota Lumajang. Mereka diseleksi dan diberi pemantapan terhadap tugas baru yang harus mereka laksanakan, yakni mempertahankan kemerdekaan. Bertempat di markas pemuda (sebelumnya adalah kamar bola ; istilah Belanda untuk gedung olahraga), para pemuda mulai mengikuti seleksi. Namun karena lokasinya tidak mencukupi, pertemuan dipindahkan di Alun-alun Lumajang. Kemudian, pada tanggal 27 Agustus bertempat di Gedung Markas Pemuda (Gedung dr. Soedjono) diadakan uji fisik dan pengetahuan umum, dengan tim penguji dr. Koesnadi (Kepala Rumah Sakit), dr. Soemo Widigdo, Bapak Pranoto, Bapak Setiawan dan Bapak Iskandar.

Pengumuman hasil ujian ini dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1945 yang dibacakan oleh dr. Soemo Widigdo, yang sebelumnya juga telah ditunjuk sebagai Ketua Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) Kabupaten Lumajang, sebuah organisasi yang menaungi BKR. Pengumuman ini sekaligus mengesahkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Kabupaten Lumajang dengan dipimpin oleh dr. Soedjono.

Kaum muda yang menghadiri rapat raksasa di Alun-alun tersebut menyambut pembentukan BKR itu dengan penuh semangat dan tidak henti-hentinya mereka meneriakkan pekik merdeka. Usai pertemuan akbar tersebut sejumlah tokoh pergerakan Lumajang secara rutin melakukan pertemuan lanjutan melalui diskusi formal ataupun diskusi-diskusi kecil. Akhirnya mereka berhasil menyusun institusi BKR berikut struktur dan anggotanya. Adapun susunan BKR Kabupaten Lumajang adalah :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pimpinan | : dr. Soedjono |
| 2. Wakil Pimpinan | : dr. Soewondo |
| 3. Bagian Siasat/strategi | : Katamsi |
| 4. Persenjataan | : M. Wijono |
| 5. Bagian Administrasi | : Yusmin |

Meskipun BKR bukanlah angkatan perang, namun atas inisiatif bersama para tokoh pergerakan, BKR dilengkapi dengan sejumlah staf dan seksi markas. Sedangkan untuk lebih mengoptimalkan pergerakan, BKR Lumajang juga membentuk komando tempur yang berstatus kompi, yakni :

- | | |
|------------|---------------------------|
| 1. Kompi I | : Sjamsul Islam di Klakah |
|------------|---------------------------|

2. Kompi II : Soenarjo di Jatiroto
3. Kompi III : M. Yasir di Condro Pasirian
4. Kompi IV : Nailoen Hamam di kota Lumajang
5. Kompi V : Soegrijanto di Rowobujel
6. Kompi VI : H. Ilmi Zein di Yosowilangun

Selain melakukan koordinasi, sejumlah tokoh pergerakan Lumajang juga berhasil melakukan mobilisasi kepada rakyat untuk bahu-membahu mengisi kekurangan dan permasalahan yang dihadapi, seperti pengumpulan dana perjuangan yang sebagian besar dipergunakan untuk pemenuhan ransum atau logistik, obat-obatan ataupun untuk keperluan penting lainnya seperti senjata, kendaraan dan peralatan perang.

RI memiliki Angkatan Perang

Kuatnya ancaman dari pihak luar dan pentingnya pembentukan angkatan perang, pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah menerbitkan Maklumat mengenai pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Isi Maklumat itu adalah : Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat (A.H Nasution, 1963). Bekas Mayor KNIL Urip Sumoharjo ditugaskan untuk segera membentuk Markas Besar Tertinggi TKR (MBT TKR) berdasarkan struktur organisasi yang dibutuhkan, seperti Divisi, Brigade, Resimen, Batalyon, dan lain-lain. Untuk pertama kalinya organisasi angkatan perang dibentuk. Pada tanggal 20 Oktober 1945, disusun formasi Kementrian Keamanan Rakyat sebagai berikut :

Menteri ad Interim	: Mohamad Sulyoadikusumo
Pemimpin Tertinggi TKR	: Suprijadi
Kepala Staf Umum TKR	: Urip Sumohardjo

Mochamad Sulyoadikusumo adalah mantan Daidancho PETA di Lumajang, Suprijadi adalah mantan Shodancho yang memimpin pemberontakan tentara PETA di Blitar dan Urip Sumohardjo adalah mantan Mayor KNIL, yang memiliki pangkat tertinggi dalam pasukan KNIL (Soedianto S. dan Abdoelkahr, 2000).

Selanjutnya pemerintah membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri dalam TKR dan akhirnya 10 Divisi terbentuk di Jawa dan 6 Divisi di Sumatera disahkan oleh MBT TKR. Adapun pembentukan 10 Divisi TKR di Jawa adalah :

- a. Divisi I : Daerah Banten dan Bogor, dipimpin Kolonel KH. Sam'un, berkedudukan di Serang.
- b. Divisi II : Jakarta dan Cirebon, dipimpin oleh Kolonel Asikin berkedudukan di Linggarjati (kemudian diganti oleh Kolonel Abdulkadir).
- c. Divisi III : Daerah Priangan, dipimpin oleh Kolonel Arudji Kartawinata, berkedudukan di Bandung (Pada November 1945 diganti oleh Kolonel A.H. Nasution).
- d. Divisi IV : Daerah Pekalongan, Semarang dan Pati, dipimpin oleh Kolonel GPH Djatikusumo, berkedudukan di Salatiga.
- e. Divisi V : Daerah Kedu dan Banyumas, dipimpin oleh Kolonel Soedirman, berkedudukan di Purwokerto (kemudian diganti oleh Kolonel Sutarto).
- f. Divisi VI : Daerah Madiun dan Kediri, dipimpin oleh Kolonel Sudiro berkedudukan di Kediri.
- g. Divisi VII: Daerah Bojonegoro, Surabaya dan Madura, dipimpin oleh Mayjen Yonosewoyo, berkedudukan di Mojokerto (kemudian diganti oleh Kolonel Soengkono).
- h. Divisi VIII : Daerah Malang dan Besuki, dipimpin oleh Jenderal Mayor Imam Soedja'i, berkedudukan di Malang.
- i. Divisi IX : Daerah Istimewa Yogyakarta, dipimpin oleh Jenderal Mayor Soedarsono, berkedudukan di Yogyakarta.
- j. Divisi X : Daerah Istmewa Surakarta, dipimpin oleh Kolonel Soetarto, berkedudukan di Surakarta.

(Sumber : Dinas Sejarah Militer TNI AD 1972)

TKR di Kabupaten Lumajang

Sebagai bagian dari lembaga perjuangan nasional, BKR di Lumajang juga melakukan peralihan menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Melalui

Maklumat Presiden 5 Oktober 1945, maka BKR Lumajang secara resmi menjadi unit kesatuan batalyon, yakni Batalyon 2 dibawah Resimen 2 Probolinggo dan dibawah Divisi VIII Malang dan Besuki. Untuk komandan batalyon diberi pangkat mayor dan untuk komandan kompi diberi pangkat kapten.

Karena besarnya antusias dari kaum muda Lumajang untuk bergabung di TKR, para tokoh pergerakan dan tokoh masyarakat mencetuskan beberapa organisasi perjuangan non militer. Meski demikian, para tokoh pergerakan dan tokoh masyarakat tersebut memberikan pelatihan hampir setingkat dengan militer, dengan disiplin tinggi dan komitmen yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian lahirlah badan-badan perjuangan seperti Hizbullah, Sabilillah, Biro Perjuangan, Pesindo dan sejumlah kelompok perjuangan lainnya. Selain itu, ada pula kesatuan militer selain Angkatan Darat, yakni Pasukan Suropati dari Angkatan Laut (ALRI) dan Angkatan Udara (AURI) di Pandanwangi.

Kesatuan Hizbullah dibawah pimpinan Komandan Soewarno menempati bekas markas KNIL di Pasirian. Kesatuan Hizbullah sebelumnya telah banyak mendapat pelatihan militer dari tentara Jepang, dengan disiplin tinggi. Jepang sangat berkepentingan terhadap kelompok agama, untuk melancarkan propagandanya. Pada masa pendudukan Jepang, markas Hizbullah berada di gedung sebelah utara Alun-alun (saat ini adalah Kantor Mapolres Lumajang). Kesatuan ini merupakan organisasi dengan kesiapan yang cukup tinggi pada saat pembentukan BKR. Selain itu, mereka juga memiliki infrastruktur hingga tingkat kecamatan dan desa. Dua orang dari kesatuan Hizbullah yang pernah mengikuti pelatihan militer Jepang adalah Abdul Rasul yang tidak lain adalah adik kandung KH. Machfudz, dan satu lagi adalah Ro'i, salah satu guru ngaji di Madrasah Nurul Islam. K.H. Machfudz juga memimpin kesatuan Sabilillah yang beranggotakan para ulama Lumajang.

Setelah melakukan koordinasi, sejumlah kelompok ini menempati markasnya masing-masing. Pesindo bermarkas di Asrama Jl. Klojen Citrodiwangsan, Biro Perjuangan di Condro, Gondoruso dan di Jalan Pasirian, BPRI bermarkas di belakang Masjid Jami' Pasirian. Kesatuan Angkatan Laut Suropati menempati markas di Klojen Timur bekas Gedung DISP Parindra dan Angkatan Udara menempati bekas Lapangan Terbang Sementara Pandanwangi.

Sedang Kesatuan Polisi menempati tangsi lamanya peninggalan Jepang di Jalan Pasirian, sebelah timur rel kereta api jalur selatan, yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman penduduk.

Ketidakstabilan Ekonomi dan Moneter

Meski kemerdekaan telah dikumandangkan, namun penderitaan rakyat akibat penjajahan Jepang masih belum mampu tertangani. Masyarakat masih merasakan tekanan mental yang masih belum pulih, buruknya tingkat kesehatan dan melambungnya harga bahan pangan akibat minimnya ketersediaan bahan. Sebagian besar hasil pangan telah dirampas Jepang untuk kepentingan perangnya. Sedangkan potensi lahan pertanian, telah berganti fungsi menjadi lahan untuk penanaman komoditas yang diwajibkan Jepang, seperti nila, kapas dan sejumlah komoditas non pangan lainnya. Angka inflasi melonjak cukup tinggi. Kekacauan harga muncul di sejumlah daerah, karena pedagang dapat mempermainkan harga tanpa pengawasan pemerintah. Hanya sebagian warga masyarakat, seperti etnis Cina mampu bertahan dalam kondisi seperti ini. Kaum pribumi hanya cukup sebagai konsumen dan sebagian lagi adalah pemasok bahan mentah.

Secara umum, fenomena ekonomi di Lumajang juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi nasional. Di tengah kondisi yang semakin tidak menentu itu, pemerintah berusaha untuk menyelamatkan bangsa ini dengan melarang peredaran dan pemberlakuan uang Jepang sebagai alat transaksi serta pembayaran hutang. Melalui Undang-undang No. 19 tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan mata uang baru, yakni Oeang Repoeblik Indonesia atau ORI, sebagai alat pembayaran yang sah untuk transaksi dan pembayaran hutang. Secara rinci isi aturan ini adalah :

1. Sepuluh Rupiah ORI sama dengan emas murni seberat 5 gram.
2. Satu rupiah ORI sama dengan 50 rupiah uang Jepang.
3. Untuk daerah di luar Jawa dan Madura ditetapkan satu rupiah ORI sama dengan 100 rupiah uang Jepang. Dalam hal ini Menteri Keuangan berhak mengubah dasar penukaran tersebut jika dianggap perlu.

Sedangkan dalam pembayaran hutang, Undang-undang ini juga mengatur



ORI Pertama Nominal Sen

Oeang Repoeblrik
Indonesia atau ORI
tahun 1946
Sumber : <http://tipsirvint.blogspot.com/2013/02/perkembangan-uang-ori-di-indonesia.html>

1. Satu rupiah uang sah sebelum ORI berlaku disamakan dengan satu rupiah ORI, jika hutang terjadi sebelum 1 Januari 1943.
 2. Dua puluh rupiah uang sah sebelum ORI berlaku disamakan dengan 1 rupiah ORI, jika hutang terjadi pada 1 Januari 1944 hingga sebelum 1 Januari 1946.
 3. Lima puluh rupiah uang sah sebelum ORI berlaku disamakan dengan 1 rupiah ORI jika hutang terjadi pada 1 Januari 1946 dan sesudahnya.
 4. Pembayaran hutang yang terjadi sebelum 1 Januari 1946 tidak dapat dilakukan dengan uang Jepang sesudah Undang-undang ini berlaku.
- (Sumber : Sejarah De Javasche Bank – DJB – 2006)

Selain itu, pemerintah juga melakukan pembatasan penggunaan uang invasi Jepang dan uang Hindia Belanda agar secara bertahap dapat menarik dua mata uang tersebut dari pasar. Akibat kebijakan pemerintah ini menimbulkan dampak yang luar biasa di masyarakat. Di Lumajang, tidak sedikit masyarakat yang memiliki kekayaan berlimpah akibat kesuksesannya pada masa pemerintahan Jepang dan sisa kekayaan pada masa Hindia Belanda, mengalami stres berat dan gila akibat kecilnya nilai tukar uang mereka terhadap ORI. Pedagang yang biasanya mempermainkan harga, juga tidak bisa berbuat banyak, karena uang hasil dagangannya tidak lagi mencukupi untuk membeli

bahan kembali atau untuk kulakan. Terlebih konsumen yang rata-rata adalah masyarakat kelas bawah dan kurang mampu, jauh lebih sengsara. Selain nilai tukar uang mereka semakin kecil, bahan pangan yang mampu mereka beli, juga semakin sedikit. Padahal sebelum diberlakukannya ORI, mereka sudah sangat kekurangan.

Pada masa itulah perjalanan moneter di Lumajang benar-benar mulai dari nol. Kelompok orang yang beruntung adalah mereka yang memperdagangkan bahan pangan. Mereka dapat tetap bertahan karena tidak mengalami penurunan permintaan yang berarti. Sedikit demi sedikit mereka mampu mengejar ketinggalan akibat rendahnya nilai tukar uang. Lagi-lagi mereka adalah dari kalangan etnis Cina yang memang cukup lihai melihat peluang pasar dan mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu.

Latar Belakang Invasi Sekutu dengan Kepentingan Belanda

Sejak Jepang menyerah pada 15 Agustus, tanggung jawab wilayah Asia

Tenggara dilimpahkan kepada Laksamana Mountbatten seorang Panglima South East Asia Command (SEAC), setelah sebelumnya dijabat oleh Jenderal Mc. Arthur. Tugas utama dari peralihan pasukan Mountbatten ini adalah untuk melucuti tentara Jepang sekaligus memulangkannya, membebaskan interniran Belanda dan Eropa yang ditawan Jepang atau Allied Prisoners of War and Internees (APWI). Maka pada tanggal 15 September 1945 sejumlah armada laut Inggris berlabuh di Tanjung Priok Jakarta. Armada ini terdiri dari armada



Konvoi Pasukan Sekutu dan KNIL di Surabaya
Sumber : <https://www.pinterest.com/pin/276408495860227202/>

kecil CS 5 (Cruiser Squardon 5) Angkatan Laut Inggris yang terdiri atas kapal penjelajah HMS Cumberland, satu fregat, dan empat penyapu ranjau dibawah pimpinan Laksamana Muda WR Petterson. Datang bersamanya adalah van der Plas dan Mayor Jenderal dari KNIL van Straten dengan kapal Belanda HM Tromp yang datang dari wilayah Asutralia mewakili pihak Belanda (Himawan S., 2006).

Selama menjalankan tugasnya di Indonesia utamanya di wilayah Jawa, Sekutu memandatkan kepada pimpinan tertinggi tentara Jepang yang masih berada di Indonesia untuk memelihara dan menjaga status quo. Namun ternyata pemimpin Tentara Jepang kurang memiliki wibawa, sehingga komando penjagaan status quo diambil alih Sekutu. Akhirnya Kolonel Mountbatten menetapkan Jakarta dan Surabaya sebagai daerah kunci (key area) untuk melaksanakan tugasnya. Untuk itu, ia menugaskan Divisi 23 dengan nama Fighting Cock untuk pelaksanaan tugas di wilayah Jawa dan Divisi 26 untuk wilayah Sumatera. Sebelumnya kedua divisi ini telah terlatih saat bertugas melucuti tentara Jepang di Semenanjung Malaya dan Singapura. Secara tegas, tentara SEAC yang dipimpin pasukan Inggris tersebut menyatakan bahwa tidak akan mencampuri urusan politik Indonesia dan hanya akan menjalankan tugasnya seperti yang telah digariskan, yakni melucuti tentara Jepang dan memulangkannya sekaligus membebaskan interniran yang ditawan Jepang di sejumlah daerah khususnya di Jawa.

Melihat kondisi seperti ini, jelas tidak menguntungkan Belanda yang ingin mendirikan kembali pemerintahan Hindia Belanda. Selain kekuatan militer Belanda yang belum memadai untuk melakukan invasi, dukungan dari Inggris sebenarnya sangat diperlukan sembari Belanda untuk menyiapkan kedatangan pasukannya dari Kerajaan Belanda. Untuk itu Belanda memanfaatkan perjanjian pemerintahannya dengan Inggris agar Indonesia kembali ke tangan kekuasaan Belanda. Civil of Affairs Agreement atau perjanjian antara pemerintah Inggris dan Pemerintah Belanda mengenai pengaturan pemindahan kekuasaan di Indonesia dari British Military Administration ke NICA (Netherland Indies Civil Administration) telah diadakan di London pada 24 Agustus 1945. Menteri Negara Michiels van Verduyen, yang pernah menjadi duta besar Belanda untuk Inggris, menyatakan bahwa Perdana Menteri Inggris Winston Churchill

telah meyakinkan dengan mengatakan : "You will get the Indies back (Hindia Belanda akan kembali pada kalian)" (Himawan S., 2006).

Akibat Civil of Affairs, posisi tentara Inggris dalam melakukan tugasnya di Indonesia menjadi ambivalen. Di satu sisi mereka harus melaksanakan tugas kemanusiaan, yakni pelucutan senjata dan pemulangan tentara Jepang serta membebaskan interniran Belanda. Namun di sisi yang lain, Inggris juga harus membantu Belanda mendapatkan kembali daerah jajahannya. Padahal, sebelum tugas itu dilaksanakan, Indonesia telah meraih kemerdekaannya sendiri, tanpa campur tangan negara lain. Terlebih, pemerintah Indonesia dengan tegas telah menyatakan sikapnya atas Civil of Affairs Inggris dan Belanda ini. Presiden Soekarno dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melakukan kerjasama apapun dengan Inggris, jika Belanda masih bergabung dengan Inggris dalam melaksanakan tugasnya.

Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh Inggris adalah mendorong kedua negara yakni Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan. Namun Belanda sejak awal telah menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan perundingan dengan Indonesia, terlebih bersama Presiden Soekarno, karena dianggap telah bersekutu dengan Jepang. Di tengah ketidakpercayaan dan rasa curiga diantara semua pihak, pada tanggal 29 September 1945, mendaratlah Divisi 23 Fighting Cock diikuti oleh pendaratan pasukan Belanda, yakni satu Detasemen Marinir dari Kapal Perang HM Tromp, untuk pertama kalinya di Jakarta. Tugas mereka adalah untuk menguasai 2 daerah kunci yakni Jakarta dan Surabaya. Minggu pertama bulan Oktober mendaratlah sisa Divisi 23 Fighting Cock, dua Batalyon Infanteri, dan satu Batalyon Artileri Medan, serta masih diikuti oleh pasukan Belanda. Tanggal 4 Oktober 1945 lima kompi KNIL dari Balikpapan dan Tarakan juga tiba di Jakarta dan masih ditambah pasukan NICA yang diberangkatkan dari Australia. Dengan pendaratan pasukan Sekutu dengan diikuti tentara Belanda lengkap dengan NICA yang akan melaksanakan tugas administrasi di Indonesia, semakin membuktikan bahwa Inggris tidak sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dan lebih memihak kepada Belanda. Inilah yang menjadi penyebab utama perlawanan rakyat Indonesia melawan sekutu.

Pertempuran Surabaya

Perlawanan oleh TKR dilakukan di sejumlah tempat, termasuk di Surabaya sebagai salah satu daerah kunci yang ditetapkan sekutu. Pada tanggal 28 Oktober 1945, pasukan Divisi VII TKR melakukan perlawanan hebat dengan pasukan Brigade India 49/Divisi 23. Pertempuran yang dilakukan Arek-arek Suroboyo dengan semangat yang tinggi, terjadi selama dua hari. Divisi VII TKR melakukan perlawanan dengan bekal senjata hasil rampasan dari tentara Jepang. Meski jumlahnya cukup besar, namun masih tidak sebanding dengan perlengkapan perang yang dimiliki tentara sekutu. Terlebih, tentara sekutu memiliki pengalaman perang yang memadahi. Sedangkan TKR, hanya berbekal sedikit pengalaman dari pelatihan Jepang, karena rata-rata mereka adalah mantan tentara PETA yang belum teruji dalam medan pertempuran. Brigade 49 kesatuan tempur Inggris/India terdiri atas 2 Batalyon "Mahrattas" dan 1 Batalyon "Rajputs", prajurit-prajurit yang ditempa dalam pertempuran melawan Jepang di Birma, nyaris mengalami kehancuran meski menghadapi kekuatan yang tidak seimbang (Himawan S., 2006). Komandan Brigade 49, Brigadir Mallaby tewas dalam peristiwa itu, lalu Inggris menuduh bahwa pembunuhan ini dilakukan secara keji oleh pasukan Indonesia. Panglima AFNEI (Allied Forces Netherland East Indies) Letnan Jenderal Christison menanggapi dengan mengerahkan seluruh kekuatan perang baik darat, laut dan udara untuk menyerang dan menguasai Surabaya.

Pada tanggal 9 November 1945, Divisi 5 dengan nama sandi Ball Fire yang merupakan Divisi India ke-5 dibawah pimpinan Mayjen Masergh yang merupakan pasukan tambahan Brigade 49, mengultimatum agar pasukan Indonesia menyerahkan senjatanya dan mengangkat tangan serta mengibarkan bendera putih (menyerah). Tentu saja ultimatum itu ditolak oleh TKR. Barisan perlawanan rakyat dibawah pimpinan Kolonel Soengkono bersama-sama mengangkat senjata mempertahankan Surabaya. Pada 10 November 1945 tepat jam 06.00, Surabaya dihujani peluru baik dari darat, laut dan udara.

Jenderal Mensergh selaku Panglima Divisi 5 yang memimpin pasukan Sekutu di Surabaya memperkirakan invasi ini akan selesai dalam waktu empat hari. Optimisme ini dikarena Surabaya telah terkepung dari berbagai penjuru

dan serangan Sekutu adalah “sapu bersih” yang berarti akan melakukan pertempuran habis-habisan. Namun, Surabaya baru berhasil dikuasai setelah 21 hari setelah digempur secara dahsyat oleh pemboman artileri dan tembakan meriam dari kapal-kapal perang yang khusus diberangkatkan dari Tanjung Perak menuju Surabaya. Sangat diluar dugaan, karena pasukan Indonesia yang baru saja dibentuk dan hanya berbekal senjata hasil rampasan dari Jepang, mampu memberikan perlawanan yang luar biasa. Bantuan pasukan-pasukan dari daerah sekitar Surabaya hingga ujung timur Jawa Timur, merupakan kekuatan besar yang mampu menghalau keganasan pasukan sekutu.

Batalyon 2/1 Punjab/Brigade 123 yang bergerak ke arah Gresik kehilangan komandan batalyonnya, Letnan Kolonel Sarbjit Singh Kalha yang gugur dalam suatu penghadangan TKR saat memindahkan pos komandonya. Bersamanya gugur pula seorang komandan baterai dari Batalyon Arteleri 144 Field Regiment, Mayor Whitcombe (Antony Brett-James, 1952). Meski terus terdesak hingga harus mundur ke daerah luar Surababaya, pasukan TKR tetap gigih melakuka perlawanan hingga menjelang agresi I Belanda. Pertempuran Surabaya memakan korban di kedua belah pihak dengan jumlah yang sangat besar.



Pertempuran Surabaya

Sumber : <https://balaiedukasi.blogspot.com/2014/11/pertempuran-disurabaya-10-november-1945.html>

Peran Pasukan Lumajang dalam Pertempuran Surabaya

Mendengar penderitaan rakyat di Surabaya akibat invasi Sekutu pada 28 Oktober 1945 Batalyon 2 Lumajang dibawah komando dr. Soedjono mengirimkan pasukannya beberapa kali ke Surabaya. Pada tanggal 15 November 1945, kompi pertama yang diberangkatkan adalah Kompi I Sjamsul Islam dengan diperkuat oleh Seksi Soewandak dan Kompi II Soenarjo. Kemudian diberangkatkan secara bergantian adalah Kompi IV Nailoen Hamam ke daerah Wonocolo. Akibat terkena tembakan, Komandan Kompi Nailoen sempat terluka dan terpaksa dirawat di Bangil. Kemudian Komandan Kompi digantikan sementara oleh Komandan Seksi Soekertijo. Karena serangan pasukan Inggris sangat gencar, maka Kompi IV Nailoen (masih dipimpin Soekertijo) sempat mundur hingga Sidoarjo. Kemudian sebagai pasukan penggantinya, Batalyon 2 Lumajang memberangkatkan Kompi V Soegrijanto ke garis depan (front) yang pada waktu itu berada di Punggul-Sruni Sidoarjo.

Dalam manuskrip pribadi tentang "Sejarah Perjuangan Rakyat Lumajang" yang ditulis oleh Soekertijo tahun 1978, menyebutkan bahwa pasukan Lumajang menyerang daerah Sepanjang dan menduduki daerah Gubeng. Banyak pasukan Lumajang yang gugur dalam pertempuran itu, luka-luka ataupun hilang. Pengiriman pasukan dari Lumajang terus berlangsung menuju Surabaya, Wonokromo, Gedangan, Buduran, Dungus, Tanggulangin dan yang terakhir menghadapi tentara Belanda di Porong-Gempol.

Meski Surabaya telah dikuasai Sekutu dalam waktu 21 hari, namun perlawanan masih terus dilakukan oleh Pasukan Indonesia. Kompi Nailoen dibawah pimpinan Soekertijo diberangkatkan 13 kali menuju garis depan. Pasukan Lumajang diangkut dengan kereta api, bersama sejumlah sukarelawan yang tergabung dalam Palang Merah Indonesia, sekaligus perbekalan makanan serta sisa-sisa senjata dan amunisi hasil rampasan dari tentara Jepang.

Disinilah peran ibu-ibu para isteri pejuang dan rakyat sipil sangat besar dirasakan oleh pejuang yang pada waktu itu berangkat berperang ke Surabaya. Dengan mengumpulkan makanan, meskipun tidak jarang kondisi mereka sendiri juga kekurangan makanan, mereka menyertakannya bersama para pejuang. Nasi bungkus dengan lauk seadanya, atau biasa disebut nuk adalah bekal yang sangat berarti bagi pejuang. Tentunya disertai doa dan harapan

agar kemenangan dapat diraih.

Beban rakyat Lumajang semakin bertambah karena banyak pengungsi berdatangan dari daerah Surabaya dan sekitarnya. Dengan perbekalan yang sangat minim, mereka mendapat perhatian yang besar dari rakyat Lumajang. Rakyat dengan sukarela membantu mereka dengan bahan makanan seadanya sekaligus tempat berlindung.

Batalyon Ketunggeng

Setelah pertempuran Surabaya, terjadi pembenahan TKR di Lumajang. Kapten Sjamsul Islam yang sebelumnya adalah Komandan Kompi I, diangkat menjadi Komandan Batalyon di Pasuruan. Tidak lama berselang, Komandan Kompi IV Nailoen Hamam ditarik ke Divisi untuk mempersiapkan pembentukan Depo Batalyon. Komandan Kompi II Soenarjo dimutasi masuk ke Resimen 2 yang pada waktu itu berada di Probolinggo. Wakil Komandan Batalyon 2, Soewondo ditarik ke Divisi. Demikian halnya dengan Kepala Bagian Siasat/Strategi, Katamsi juga ditarik ke Divisi.

Sedangkan untuk mengisi beberapa jabatan yang kosong, dr Soedjono yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Komandan Batalyon 2 Lumajang melakukan pengangkatan. Mereka adalah Kapten Soewandak menggantikan Kapten Sjamsul Islam sebagai Komandan Kompi I. Kemudian Kapten Djoko Hadi Soeprapto menggantikan Kapten Soenarjo sebagai Komandan Kompi II. Kapten Soekertijo menggantikan Kapten Nailoen Hamam sebagai Komandan Kompi III.

Dalam pembenahan TKR selanjutnya yang kemudian berubah menjadi TRI, setelah Divisi VIII berubah menjadi Divisi VII (Malang Besuki), maka Resimen 2 Probolinggo berubah menjadi Resimen 39, dan Batalyon 2 Lumajang menjadi Batalyon 8. Atas perubahan ini, ada beberapa perombakan yang dilakukan, diantaranya :

1. Kompi Soekertijo yang pada saat itu masih dikenal dengan Kompi Nailoen,
Ditarik ke Malang sebagai pasukan inti dan bertugas sebagai pelatih di Depo Batalyon yang baru dibentuk. Sedangkan Soekertijo tetap dipertahankan di Lumajang.

2. Kapten H. Ilmi Zein dan Kapten Soegrijanto ditarik ke resimen.
3. Kapten Djoko Hadi Kusumo ditarik di Komando Batalyon.

Setelah serah terima jabatan Komandan Batalyon 8 Lumajang, maka susunan kompi dimampatkan, dari enam kompi menjadi empat kompi saja. Susunannya adalah :

1. Kompi I : Kapten M. Yasir
2. Kompi II : Kapten Soekertijo
3. Kompi III : Kapten Soewandak
4. Kompi IV : Kapten Soewadi

Setelah melakukan perubahan untuk tingkat kompi, Komandan Batalyon dr. Soedjono dimutasi menjadi dokter di resimen. Sebagai penggantinya adalah Mayor M. Wijono. Beberapa bulan sebelum agresi I, resimen yang semula berkedudukan di Probolinggo, kemudian dipindahkan ke Lumajang, dengan ditandai pergantian pimpinannya, dari Letkol. Soedarsono kepada Letkol. Soedirman. Kemudian, Resimen Jember, juga digabungkan di Resimen Lumajang, yang juga diawali dengan pergantian pimpinannya, dari Letkol Soedirman kepada Letkol. Soeroedji. Pasca penggabungan resimen inilah, ada penambahan nama divisi, resimen dan batalyon. Divisi VII ditambah menjadi

Divisi VII Untung Suropati, Resimen 39 ditambah menjadi Resimen 39 Menak Koncar dan Batalyon 8 ditambah menjadi Batalyon 8 Ketunggeng. Pasca perubahan TRI menjadi TNI, komando resimen Lumajang dipindahkan ke Malang, sedang yang ada di Lumajang hanya Detasemen Markas dan Perwakilan Staf.



Batalyon Ketunggeng Semasa Di Makasar

Sumber : Koleksi DHC '45